

Rakhmadsyah Putra Rangkuty, S.Sos., M.Si

Modal Sosial dan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kajian Modal Sosial dalam
Pemberdayaan Perempuan Melalui
Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan

UNIMAL PRESS

MODAL SOSIAL dan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

**(Kajian Modal Sosial dalam Pemberdayaan Perempuan
Melalui Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan)**



universitas
MALIKUSSALEH

Rakhmadsyah Putra Rangkuty, S.Sos., M.Si

**MODAL SOSIAL dan
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**
(Kajian Modal Sosial dalam Pemberdayaan Perempuan
Melalui Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan)

UNIMAL PRESS

Judul: **MODAL SOSIAL dan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**, (*Kajian Modal Sosial dalam Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan*)

viii + 88 hal., 15 cm x 23 cm

Cetakan Pertama: September, 2018

Hak Cipta © dilindungi Undang-undang. *All Rights Reserved*

Penulis:

Rakhmadsyah Putra Rangkyu, S.Sos., M.Si

Perancang Sampul dan Penata Letak:

Eriyanto

Pracetak dan Produksi:

Unimal Press

ISBN 978-602-464-038-5

Penerbit:

UNIMAL PRESS



Unimal Press

Jl. Sulawesi No.1-2

Kampus Bukit Indah Lhokseumawe 24351

PO.Box. 141. Telp. 0645-41373. Fax. 0645-44450

Laman: www.unimal.ac.id/unimalpress.

Email: unimalpress@gmail.com

ISBN: **978-602-464-038-5**

Dilarang keras memfotocopy atau memperbanyak sebahagian atau seluruh buku ini tanpa seizin tertulis dari Penerbit

Kata Pengantar

Masih tingginya angka kemiskinan yang ada di masyarakat, menyebabkan pemerintah mencari suatu jalan untuk program pengentasan kemiskinan yang sudah lama terjadi di negeri ini. Sudah banyak program yang diluncurkan namun belum mencapai hasil yang optimal. Terakhir pemerintah meluncurkan Program PNPM Mandiri Perdesaan yang di dalamnya terdapat satu program khusus untuk perempuan yang disebut dengan Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Program ini sebagai suatu program penanggulangan kemiskinan dalam pelaksanaannya berbasis pada pemberdayaan masyarakat, khususnya kelompok perempuan. Tulisan ini ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana peran modal sosial dalam pelaksanaan Program PNPM Mandiri khususnya SPP dan upaya yang dilakukan dalam pemberdayaan perempuan melalui pengembangan unsur-unsur modal sosial.

Tulisan ini bersumber dari hasil penelitian yang dilakukan dilakukan di 10 desa di Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa peran modal sosial dalam pemberdayaan kelompok SPP adalah penggunaan modal kepercayaan (trust) dan norma dalam dinamika kelompok. Modal sosial ini digunakan sejak awal dibentuknya kelompok sampai dengan pengembangan kelompok selanjutnya. Selain itu modal jaringan sosial (network) digunakan dalam memberikan kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. Modal sosial ini memberikan akses terhadap sumber-sumberdaya yang dimiliki oleh kelompok SPP. Pengembangan modal sosial untuk pemberdayaan perempuan dilakukan dengan cara membangun kerja sama dalam kelompok, mengintensifkan komunikasi dan informasi dalam kelompok SPP, serta membangun kohesi sosial dan inklusi kelompok.

Penulis berharap bahwa melalui tulisan ini dapat membuka mata berbagai pihak dan kalangan untuk memahami kemampuan perempuan yang luar biasa dalam ikut serta membangun bangsa. Dengan segudang kemampuan yang dimilikinya perempuan mampu mengaktualisasikan dirinya setara dengan laki-laki. Tulisan ini pun tidaklah berhasil tanpa bantuan berbagai pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dalam berbagai hal selama pengumpulan data penelitian dilapangan sampai terciptanya karya tulis ini.

Dengan Rahmat Allah SWT., penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Apridar, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Malikussaleh; Bapak M. Akmal S.Sos., MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara; Bapak Al Chaidar, S.IP., M.Si., selaku Ketua UPT. Unimal Press yang telah sangat membantu dalam menerbitkan karya tulis ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Pihak Universitas Malikussaleh yang telah memfasilitasi penulis dalam menerbitkan karya tulis ini. Penulis berharap karya ini dapat memperkaya penerangan para pembaca, khususnya mahasiswa di lingkungan Universitas Malikussaleh.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Prof. Dr. Badaruddin, M.Si., yang telah berkenan membimbing dan membagi inspirasi dalam penerbitan karya tulis ini. Penulis turut mengucapkan terimakasih kepada Drs. Muba Simanihuruk, M.Si., yang telah berkenan untuk berbagai ilmu dan menemani berdiskusi sehingga memperkaya dalam khasanah pemikiran penulis. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada kolega dan teman seperjuangan, terimakasih untuk dukungan dan semangat yang selalu diberikan oleh Bang Agung, Bang Amir, dan Pangeran Nasution.

Penulis juga mengucapkan terima kasih atas doa, dukungan, dan semangat yang selalu diberikan oleh Ayahanda Drs. H. Djohar Rangkuti (alm.) dan Hj. Poniayah; Drs. Abdul Hadi Nasution dan Hj. Syarifah (Almh.) serta Hj. Nuril Amnah Nasution. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada istri dan anak-anak, Ridha Fahrani Nasution, S.Sos., Rahman, Rahim, Rafa dan Rishad yang selalu bersabar dan memberikan doa serta dukungan sampai karya ini terbit. Atas bantuan semua pihak, penulis mengucapkan terima kasih. Sungguh, semoga keimanan dan kehormatan dalam megahnya ilmu pengetahuan selalu meyertai kita semua Amin.

Bukit Indah, September 2018

Penulis,

Rakhmadsyah Putra Rangkuty, S.Sos., M.Si

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii

BAB I

PENDAHULUAN	1
• Latar Belakang	1
• Lingkup Studi.....	10
• Konstruksi Teoritik.....	10
- Modal Sosial	10
- Pemberdayaan Masyarakat	18
- PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)	22
• Metode Penelitian.....	23
- Informan, Populasi dan Sample Penelitian	24
• Karakteristik Responden	25
- Usia Responden	25
- Agama Responden.....	25
- Pendidikan Responden	26
- Pekerjaan Responden.....	27
- Suku Bangsa Responden	28
• Teknik Pengumpulan Data.....	29
- Defenisi Konsep dan Operasional.....	30
- Defenisi Konsep.....	30
- Defenisi Operasional	31
• Bingkai Analitik	31

BAB II

POTRET KEHIDUPAN MASYARAKAT	33
• Kondisi Geografis.....	33
• Kondisi Demografis.....	34
• Struktur Mata Pencaharian.....	34
• Kondisi Pendidikan.....	34
• S u k u.....	35
• Program PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Dolok Merawan.....	36

BAB III	
PERAN MODAL SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN	
KELOMPOK SPP	45
• Peran Kepercayaan (<i>Trust</i>) dan Norma dalam Dinamika Kelompok.....	45
• Peran Jaringan Sosial (<i>Network</i>) dalam Kepedulian terhadap Lingkungan Sekitar.....	62
• Membangun Kerja Sama dalam Kelompok.....	71
• Intensitas Komunikasi dan Informasi.....	75
• Menjaga Kohesi Sosial dan Inklusi Kelompok.....	77
BAB V	
PENUTUP	80
RIWAYAT PENULIS	87



BAB I

PENDAHULUAN

• Latar Belakang

Menganalisa faktor-faktor penyebab kemiskinan dalam masyarakat merupakan sesuatu yang kompleks. Permasalahannya dapat dimulai dari sumberdaya manusia, kondisi alam dan geografis, serta kondisi sosial budaya. Faktor lain penyebab munculnya kemiskinan di masyarakat adalah ketidakmampuan masyarakat itu sendiri. Kondisi ini antara lain diakibatkan oleh: masyarakat tidak memiliki akses informasi yang mereka butuhkan, serta tidak adanya fasilitas penunjang bagi masyarakat miskin.

Selain faktor tersebut di atas, sebagian besar masyarakat yang hidup dalam kemiskinan memiliki kemampuan sumber daya manusia (*skill*) yang rendah, serta diperparah lagi dengan kemampuan manajerial keuangan (*financial*) masyarakat miskin itu sendiri yang pada akhirnya akan semakin mempersulit dalam proses pengentasan kemiskinan. Berkaitan dengan kemiskinan ini, Yunus (2007:142) menyebutkan bahwa kaum miskin menjadi miskin bukan karena tidak terampil atau buta huruf, tapi karena mereka tidak bisa menyalurkan hasil yang didapat dari kerja mereka. Mereka tidak memiliki kontrol atas modal, padahal kemampuan mengontrol modal adalah yang memberi orang kekuatan untuk lepas dari kemiskinan.

Secara konseptual, sudah banyak defenisi kemiskinan yang dikemukakan oleh para ahli. Salah satu di antaranya dikemukakan oleh Friedman (dalam Ala, 1996:4) yang mendefenisikan kemiskinan sebagai: ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial meliputi (tidak terbatas pada): modal yang produktif atau *assets*; sumber-sumber keuangan (*income* dan kredit yang memadai); organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama; *network* atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang dan lainnya; pengetahuan dan keterampilan yang memadai; dan informasi yang berguna untuk memajukan kehidupan.

Defenisi kemiskinan lainnya dikemukakan oleh Usman (2006) yang melihat bahwa kemiskinan sebagai sebuah kondisi kehilangan (*deprivation*) terhadap sumber-sumber pemenuh kebutuhan dasar yang berupa pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Mereka yang berada dalam kategori miskin, hidupnya

serba kekurangan. Menurutnya, paling tidak ada tiga macam konsep kemiskinan yaitu:

- Kemiskinan Absolut, yang dirumuskan dengan membuat ukuran tertentu yang konkret (*a fixed yardstick*);
- Kemiskinan Relatif, yang dirumuskan berdasarkan *the idea of relative standard*, yaitu dengan memperhatikan dimensi tempat dan waktu;
- Kemiskinan Subyektif, yaitu konsep kemiskinan yang dirumuskan berdasarkan perasaan kelompok miskin itu sendiri, konsep ini tidak mengenal *a fixed yardstick*, dan tidak memperhitungkan *the idea of relative standard*.

Munculnya defenisi tentang kemiskinan ini tidak terlepas dari hasil kajian yang dilakukan terhadap berbagai kebijakan pembangunan yang ditujukan sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Hal ini juga berkaitan dengan paradigma pembangunan yang digunakan. Pada masa lalu, paradigma pembangunan menggunakan pendekatan *top down* dan selanjutnya paradigma pembangunan yang digunakan berubah menjadi bersifat *bottom up*. Pendekatan pembangunan yang bersifat *bottom up* ini dalam pelaksanaannya lebih memosisikan masyarakat sebagai *subjek* pembangunan ketimbang menjadi *objek* pembangunan seperti yang selama ini terjadi. Pada intinya, pembangunan yang bersifat *bottom up* ini dikenal dengan istilah *People Centered Development* (Soetomo, 2013b:5; Adi, 2007:147).

Pelaksanaan pembangunan yang menggunakan pendekatan *People Centered Development* ini menjadi sebuah solusi dalam pembangunan yang menekankan bahwa tidak boleh sepenuhnya pembangunan mengandalkan belas kasihan dari pemerintah semata, tetapi juga perlu ditunjang dengan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Kondisi ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Timmer (dalam Soetomo, 2012b:348-349) bahwa tidak mungkin mengharapkan suatu strategi pembangunan masyarakat yang sepenuhnya terbebas dari peranan pemerintah khususnya di negara sedang berkembang. Peranan pemerintah pusat hanya sebagai pendorong dan pembina kemampuan masyarakat untuk mengantisipasi dan mengembangkan berbagai peluang yang muncul.

Belajar dari beberapa program pengentasan kemiskinan yang telah ada sebelumnya terlihat bahwa masih sangat kuatnya campur tangan pemerintah di dalamnya. Menyikapi perubahan paradigma pembangunan yang digunakan maka pemerintah melakukan sebuah

program pembangunan yang dianggap mampu melibatkan peran serta masyarakat didalamnya, yang kelak bisa menjadi solusi dalam kegiatan pengentasan kemiskinan. Pemerintah menggulirkan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) yang bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Salah satu programnya adalah berkaitan dengan kegiatan kelompok perempuan yaitu pemberdayaan perempuan dengan kegiatan usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Program PNPM Mandiri ini dicanangkan pemerintah pada tahun 2007, yang berpedoman pada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan No: 25/KEP/ MENKO/ KESRA/VII/2007. PNPM Mandiri dibagi menjadi beberapa program yaitu: PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri Wilayah Khusus dan Desa Tertinggal.

Beberapa dari program yang telah terlebih dahulu dijalankan sebelumnya telah melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatannya, namun beberapa program kegiatan tersebut juga masih bersifat *karitatif* yang mempunyai dampak negatif bagi keberadaan modal sosial di masyarakat.

Program-program yang sifatnya *karitatif* umumnya akan membuat manja masyarakat. Soetomo (2012b:233) menyebutkan bahwa program-program yang bersifat *karitatif* ini merupakan program yang anti partisipatif, karena bersifat *delivery approach*, sehingga kurang mendidik untuk mengembangkan kapasitas masyarakat.

PNPM-MP dalam kegiatannya mengajak seluruh anggota masyarakat agar terlibat dalam setiap tahapan kegiatannya secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan, pengelolaan, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. Inilah kebijakan pembangunan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam proses kegiatannya.

Pembangunan partisipatif merupakan pendekatan pembangunan yang sesuai dengan hakikat otonomi daerah, meletakkan landasan pembangunan yang tumbuh berkembang dari masyarakat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh masyarakat dan hasilnya dinikmati oleh seluruh masyarakat. Memberikan peranan lebih besar kepada masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses pembangunan, akan membawa dampak positif dalam proses pembangunan berkelanjutan.

Program PNPM-MP hadir untuk memperbaiki paradigma pembangunan *top down* tersebut, sesuai dengan tujuan dari kegiatan PNPM-MP itu sendiri yakni meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kebijakan PNPM-MP dalam setiap kegiatannya selalu mempersyaratkan keterlibatan seluruh warga masyarakat dalam implementasinya. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat merupakan persyaratan utama dalam setiap program atau kegiatannya.

Seperti dikemukakan oleh Suparjan (2003:53) bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan sebuah program pembangunan mutlak diperlukan karena masyarakatlah yang pada akhirnya akan melaksanakan program tersebut. Adanya keterlibatan masyarakat memungkinkan adanya rasa tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap keberlanjutan program pembangunan yang dilakukan.

PNPM-MP sebagai suatu program penanggulangan kemiskinan dalam pelaksanaannya berbasis pada pemberdayaan masyarakat. PNPM-MP dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan sebagai pendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Program ini menjadi sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang representatif, mengakar dan menguat bagi perkembangan modal sosial masyarakat di masa mendatang.

Sering sekali kegiatan pembangunan yang dilakukan menyebabkan modal sosial yang ada dalam masyarakat terabaikan. Padahal peranan modal sosial sangat penting dalam proses pembangunan seperti dikemukakan oleh Mawardi (2007), bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat (ekonominya) dibanyak negara termasuk di Indonesia terlalu menekankan pentingnya peranan modal alam (*natural capital*) dan modal ekonomi (*economic capital*) modern seperti barang-barang modal buatan manusia, teknologi dan manajemen, dan sering mengabaikan pentingnya modal sosial seperti kelembagaan lokal, kearifan lokal, norma-norma dan kebiasaan lokal.

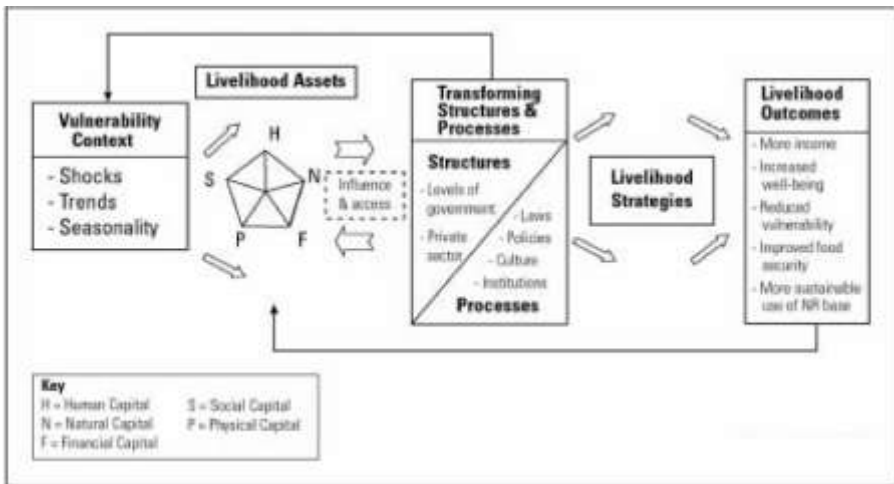
Penjelasan tersebut menekankan bahwa dalam kehidupan masyarakat tidak tertumpu pada satu aspek modal saja, akan tetapi saling mendukung antara modal yang satu dengan modal lainnya. Dalam kajian *Sustainable Livelihood* terdapat beberapa modal yang

ada di dalam masyarakat yang saling memengaruhi. Masyarakat hidup dan demi kelangsungan hidup dan penghidupannya, mereka bertumpu pada modal (aset-aset) penghidupan yang beragam seperti: aset sumber daya alam dan lingkungan, *sosial capital*, *finansial capital* serta sumber daya manusia, dan sumber daya infrastruktur fisik. Keberlanjutan penghidupan dari masyarakat yang disebut miskin atau marginal sering secara cermat melakukan *diversifikasi* kegiatan yang merupakan hasil *transformasi* dari aset-aset (sumber daya, *capital* atau modal). Inilah yang dikenal dengan istilah *Pentagon Asset*. Ellis (2000) menjabarkan *Pentagon Asset* sebagai berikut:

- Modal Alam (*Natural Capital*) terdiri dari tanah, air, dan sumber daya biologi yang digunakan oleh manusia sebagai sarana bertahan hidup. Modal alam lebih banyak mengacu pada sumber daya lingkungan (*enviromental resources*) baik yang dapat diperbaharui atau tidak.
- Modal Fisik (*Physical Capital*) menyangkut modal yang diciptakan oleh proses ekonomi produksi seperti: bangunan, irigasi, jalan, mesin, dan lainnya.
- Modal Sumber Daya Manusia (*Human Capital*) mengacu kepada sumber daya tenaga kerja yang ada pada rumah tangga seperti: pendidikan, keterampilan, dan kesehatan.
- Modal Finansial (*Financial Capital and Substitutes*) mengacu kepada persediaan uang yang telah diakses oleh rumah tangga misalnya: tabungan, akses untuk mendapatkan kredit dalam bentuk bantuan.
- Modal Sosial (*Social Capital*) mencakup adanya kepercayaan (*trust*), *clientization*, hubungan kekerabatan, suku, daerah asal, almamater, dan lain sebagainya.

Kelima modal tersebut yang sering disebut sebagai *Pentagon Asset* akan dikombinasikan melalui berbagai strategi sehingga akan menghasilkan sistem penghidupan.

Gambar 1.1. Kerangka Kehidupan Berkelanjutan



Sumber: Sustainable Livelihood Framework, DFID:1999.

Peran modal sosial dalam pembangunan dapat dipergunakan sebagai alat *assesment*, terutama untuk mengetahui apakah kepercayaan dan partisipasi di dalam komunitas itu besar atau kecil. Jika tingkat kepercayaan dan partisipasi warga masyarakat itu besar, maka kebijakan sosial, terutama bagi penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan, dan dapat diperkirakan program itu akan berhasil. Tetapi jika ternyata tingkat kepercayaan dan partisipasi warga dalam komunitas itu rendah, maka perlu dilakukan intervensi sosial atau program sosial yang dapat meningkatkan kepercayaan sosial (Alfitri, 2011:45).

Sayogyo (1999:6) menekankan arti pentingnya peran modal sosial dalam pembangunan khususnya yang berasal dari komunitas lokal. Lahirnya gerakan masyarakat yang bermula pada komunitas lokal perlu dirangsang. Ada sejumlah syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi, paling tidak menurutnya ada tiga syarat terpenting yaitu:

- Restrukturisasi kelembagaan komunitas. Tatanan dasar yang mengatur kehidupan komunitas perlu direorientasi (UU politik dan pemerintahan), dari pola feodalistik dan kolonial (pemerintahan yang kuat dan paternalistik) ke pola pemerintahan yang lebih profesional dan masyarakat yang dinamis. Tatanan baru perlu menjamin kebebasan masyarakat berekspresi dan mengembangkan inisiatif lokal

untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan azasinya. Masyarakat harus menjadi subyek dan penentu utama dari segala kegiatan pembangunan dalam arti yang sesungguhnya.

- Meninjau kembali segala kebijakan yang memperlemah kebudayaan masyarakat dan menggantinya dengan kebijakan yang lebih memihak pada upaya peningkatan keberdayaan masyarakat desa untuk memperbaiki nasib sendiri.
- Pada aras program, pendekatan *top-down* harus segera diganti dengan pendekatan *bottom up*, yang tercermin dari mekanisme pengambilan keputusan dan penyelenggaraan program. Istilah program pengembangan masyarakat seharusnya tidak lagi berkonotasi program masuk desa, melainkan program dari desa. Artinya, dalam segala kegiatan pembangunan desa, masyarakat desa itulah yang menjadi subyek dan pelaku utama. Mulai dari peninjauan masalah dan kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi sampai pemanfaatan hasil-hasilnya. Dalam keadaan demikian, masyarakat akan menerima kegagalan maupun keberhasilan program secara bertanggung jawab.

Salah satu komponen program dalam PNPM-MP berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) berupa dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat miskin. Ruang lingkup kegiatannya yaitu penyediaan sumber keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan ekonomi masyarakat miskin.

Dana bergulir yang diberikan kepada setiap kelompok khususnya kelompok perempuan pada PNPM-MP merupakan bentuk pemberdayaan ekonomi rumah tangga. Dana bergulir yang diberikan kepada kelompok masyarakat (terutama kaum perempuan) diharapkan dapat digulirkan kembali kepada kelompok lain, sehingga perputaran uang semakin cepat dan semakin banyak kaum perempuan yang tersentuh program tersebut.

Remenyi (2000) melihat bahwa peningkatan akses terhadap sumberdaya dapat membebaskan perempuan dari kemiskinan. Asumsi inilah yang membuat lebih banyak perhatian diberikan pada kebutuhan perempuan. Tidak heran kalau perempuan menjadi kelompok sasaran utama kegiatan kredit mikro. Yunus (2007) melihat kemiskinan yang terjadi diakibatkan oleh ketiadaan kontrol atas modal. Orang miskin tidak mewarisi modal atau kredit dan tidak

ada yang memberi mereka akses modal atau kredit karena tidak layak kredit.

Kehadiran kelompok-kelompok dalam pelaksanaan Program PNPM-MP terutama yang terkait dengan kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) di Kecamatan Dolok Merawan, menunjukkan bahwa kegiatan kelompok SPP ini telah merangsang terbentuknya kelompok-kelompok di tengah-tengah masyarakat. Kelompok menjadi prasyarat bagi penyaluran bantuan permodalan untuk kelompok perempuan. Pembentukan kelompok-kelompok baru dimaksudkan untuk memperluas jaringan, dilandasi dengan modal kepercayaan untuk meningkatkan kapasitas individu perempuan.

Hal ini menjadi titik awal adanya modal sosial sebagai kekuatan dasar terbentuknya kelompok SPP tersebut. Terbentuknya kelompok-kelompok perempuan yang ada sekarang ini tidak terlepas dari kuatnya *mutual trust* yang sudah tercipta pada masa lalu, serta hubungan-hubungan sosial yang selama ini sudah terbangun dengan baik dan saling menguntungkan (*simbiosis mutualisme*). Mengutip pendapat Fukuyama (2002) yang mengatakan bahwa kepercayaan dan jaringan merupakan aspek dari modal sosial yang dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi kegiatan ekonomi masyarakat.

Kegiatan kelompok SPP yang sudah berjalan selama ini sangat membantu masyarakat setempat khususnya perempuan. Kelompok bisa mendapatkan pinjaman dana bergulir sebagai modal usaha dengan persyaratan yang lebih mudah dibandingkan dengan pinjaman uang melalui lembaga keuangan formal seperti bank yang banyak persyaratannya, dan hampir tidak mungkin dapat terpenuhi mereka. Rendahnya akses perempuan miskin terhadap lembaga keuangan formal, membuat lembaga keuangan mikro ini menjadi pilihan.

Terbentuknya kelompok perempuan di masyarakat merupakan suatu gerakan perempuan dalam upaya merubah ekonomi keluarga miskin. Perempuan menjadi penyokong ekonomi dalam keluarga. Menurut Sen (1999), perempuan merupakan *agent of change* memiliki peranan penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Terlihat bahwa perempuan di sini berperan tidak hanya sebagai objek, pengamat semata, melainkan pula sebagai subjek dalam setiap pembangunan. Partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi merupakan hal penting yang tidak hanya mengurangi level

kemiskinan pada perempuan, melainkan pula sebagai langkah penting untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Suatu studi yang dilakukan Lestari (2010) pada Kredit SPP (Simpan-Pinjam Kelompok Perempuan) PNPM-MP terhadap Pendapatan Masyarakat di Desa Lanji Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan adanya program simpan pinjam yang pro rakyat dengan syarat yang mudah dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Adanya kerjasama yang baik antara pengelola SPP (Simpan-Pinjam Kelompok Perempuan) PNPM-MP dengan masyarakat ternyata mampu memberdayakan masyarakat desa untuk mencapai kemajuan ekonomi dan kemakmuran bersama.

Studi lainnya yang dilakukan oleh Sidayati (2013) pada Pemberdayaan Ekonomi Melalui Dana Bergulir PNPM Mandiri Bagi Kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Desa Sraten Kabupaten Semarang menunjukkan bahwa UPK menjalankan kegiatan simpan pinjam pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) layaknya lembaga keuangan, dengan menjalankan salah satu peran yaitu memberikan kredit pada masyarakat. Kredit diberikan kepada kelompok-kelompok dengan sistem tanggung renteng. Pada kegiatan pemberdayaan masyarakat belum dilakukan usaha pendampingan terhadap pelaku-pelaku usaha yang terhimpun dalam Kelompok SPP. Usaha Kelompok SPP belum dilakukan dengan baik, sebagian besar merasa belum ada peningkatan usaha, bahkan peningkatan pendapatan (dengan adanya penambahan modal), belum melakukan inovasi usaha, serta belum melakukan promosi.

Penemuan-penemuan di atas menunjukkan bahwa “terbentuknya kelompok-kelompok perempuan” menjadi prasyarat pelaksanaan Program SPP PNPM-MP. Hal ini juga terjadi di lokasi penelitian. Kelompok-kelompok perempuan yang dibentuk dalam masyarakat merupakan gambaran telah adanya modal sosial yang baik di masyarakat, yang selanjutnya membentuk kelompok-kelompok perempuan baru lainnya yang semakin banyak dan berkembang. Atas dasar pertimbangan tersebut maka peneliti menganggap bahwa Kecamatan Dolok Merawan layak untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian yang berkaitan dengan modal sosial dalam pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perdesaan khususnya Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana peran modal sosial dalam pelaksanaan Program PNPM Mandiri khususnya Program Simpan Pinjam

Perempuan (SPP) dan upaya yang dilakukan dalam pemberdayaan perempuan melalui pengembangan unsur-unsur modal sosial.

• **Lingkup Studi**

Permasalahan dalam tulisan ini yaitu berkaitan dengan bagaimana peran modal sosial dalam pemberdayaan perempuan melalui program PNPM-MP dan bagaimana upaya pemberdayaan perempuan pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) melalui pengembangan unsur-unsur modal sosial tersebut.

Telaah atas permasalahan dalam tulisan ini berupaya untuk menemukan bagaimana modal sosial berperan dalam pemberdayaan perempuan melalui program PNPM Mandiri Perdesaan, sehingga terdapat faktor modal sosial yang mendorong terbentuk dan berkembangnya kelompok-kelompok perempuan ini. Selanjutnya telaah juga dimaksudkan untuk menemukan upaya dalam pemberdayaan perempuan yang dilakukan melalui pengembangan unsur-unsur modal sosial sehingga unsur-unsur tersebut mampu berperan dalam kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi perempuan.

Daerah yang menjadi Studi dalam tulisan ini adalah 10 Desa di Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara. Desa tersebut adalah: Desa Dolok Merawan, Desa Paritokan, Desa Naga Raja I, Desa Limbong, Desa Pabatu I, Desa Gunung Para II, Desa Pabatu VI, Desa Panglong, Desa Kalembak, dan Desa Mainu Tengah.

Adapun alasan pemilihan lokasi ini adalah karena di Kecamatan Dolok Merawan ini kegiatan Program PNPM-MP khususnya Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) telah terlaksana dengan baik dan kelompok usahanya terus berkembang. Desa-desa tersebut merupakan desa-desa yang memiliki kelompok SPP di daerahnya.

• **Konstruksi Teoritik**

Modal Sosial

Kemunculan dan perkembangan konsep modal sosial (*social capital*) menarik perhatian masyarakat dunia mulai meningkat sejak 2 (dua) dekade terakhir (Ancok, 2003). Cohen dan Prusak (2001), mengungkapkan bahwa istilah modal sosial pertama kali muncul tahun 1916, pada saat ada diskusi tentang upaya pembangunan pusat pembelajaran masyarakat. Konsep modal sosial kemudian muncul ke

permukaan sebagai sebuah wacana ilmiah oleh James S. Coleman pada tahun 1990.

Pembahasan tentang konsep modal sosial semakin menghangat setelah munculnya tulisan Putnam pada tahun 1993 yang menggambarkan kualitas kehidupan masyarakat Amerika yang semakin menurun dalam hal kelekatan antar sesama warga (Putnam, 1993). Diskusi terhadap konsep ini semakin lengkap setelah diterbitkannya dua buku yang ditulis oleh Francis Fukuyama. Buku yang pertama adalah *Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity* yang terbit pada tahun 1995 dan diikuti dengan terbitnya buku kedua yang lebih mutakhir dengan judul *The Great Disruption: Human Nature and The Reconstitutions of Social Order* yang diterbitkan pada tahun 2000.

Selain buku yang diterbitkan oleh Fukuyama, terbit pula tulisan Robert D. Putnam yang berjudul *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community* pada tahun 2000, yang juga dianggap sebagai pemicu pembahasan terhadap konsep modal sosial.

Beberapa definisi tentang modal sosial akan dipaparkan dalam Tinjauan Pustaka ini sebagai konsep dasar tentang modal sosial. Bourdieu dan Wacquant (dalam Field 2005:20) mendefinisikan modal sosial sebagai berikut:

“Social capital is the sum of resources, actual or virtual, that accrue to an individual or a group by virtue of possessing a durable network of more or less institutionalized relationships of mutual acquaintance and recognition.”

Modal sosial merupakan jumlah sumberdaya, aktual maupun maya, yang berkumpul pada seorang individu atau kelompok karena memiliki jaringan tahan lama berupa hubungan timbal balik perkenalan dan pengakuan yang sedikit banyak terinstitusionalisasikan. Bourdieu memberikan penekanan agar modal sosial tersebut dapat bertahan nilainya, maka individu harus mengupayakannya.

Pemikiran Bourdieu (dalam Field 2003:24) terpusat pada pokok pemahaman tentang hierarki sosial yang dipengaruhi oleh Sosiologi Marxis. Bourdieu berpendapat bahwa modal ekonomi adalah akar dari semua jenis modal lain. Bourdieu melihat modal sosial sebagai hak milik eksklusif elite, yang didesain untuk mengamankan posisi relatif mereka, yang pada akhirnya modal sosial digunakan sebagai aset bagi orang-orang yang berkedudukan istimewa dan merupakan sarana untuk mempertahankan superioritas mereka.

Defenisi modal sosial lainnya dikemukakan oleh Coleman (dalam Dasgupta, 1999:13), yang menyebutkan konsep modal sosial sebagai:

“as a resources for action is one way of introduction social structure into the rational action paradigm. Three form of social capital are examined: obligations and expctations, information channels, and social norms”

Coleman tidak memberikan defenisi tentang modal sosial dalam rumusan kalimat defenisi yang jelas dan tegas. Mungkin latar belakang dari strategi ini adalah asumsi bahwa semua pembaca telah mengetahui apa artiya struktur sosial, fungsi, aspek-aspeknya, kapital sosial itu sendiri, dan sejumlah konsep ekonomi yang terkait kapital sosial (Lawang, 2005:211).

Pemikiran Coleman banyak dipengaruhi oleh Gary Becker. Karya Becker tentang modal sosial menggunakan kerangka kerja pilihan rasional. Teori Pilihan Rasional atau Tindakan Rasional memiliki keyakinan yang sama dengan ekonomi klasik bahwa semua perilaku berasal dari individu yang berusaha mengejar kepentingan mereka sendiri. Dengan demikian interaksi sosial dipandang sebagai bentuk pertukaran.

Dari Teori Pilihan Rasional kemudian berkembang menjadi pandangan yang luas tentang masyarakat sebagai sekumpulan sistem sosial perilaku individu. Coleman melihat bahwa modal sosial merupakan nilai dasar dari aspek-aspek struktur sosial bagi aktor sebagai sumber yang dapat digunakan untuk mencapai tujuannya. Hal ini menunjukkan bahwa struktur sosial tidak mempunyai nilai modal sosial secara intrinsik tetapi yang membuat nilai adalah aktor. Oleh karena itu Coleman menolak determinisme struktur terhadap aktor (Field, 2003:32-46).

Teori Pilihan Rasional yang dikemukakan oleh Coleman berasumsi bahwa aktor individu biasanya mengejar kepentingan diri mereka sendiri, jika mereka memilih bekerjasama, itu semua karena hal tersebut menjadi kepentingannya. Modal sosial menyediakan seperangkat norma dan sanksi yang memungkinkan individu bekerjasama untuk memperoleh manfaat timbal balik.

Berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh Coleman tentang pilihan rasional di atas, argumen yang lebih rasional tentang mengapa kredit mikro lebih baik ditujukan pada perempuan, dapat digali dari strategi bertahan hidup perempuan di sektor informal, yang juga berkaitan dengan karakteristik umum perempuan yang selama ini dikenal. Menurut Rose (1992) karakteristik perempuan

lebih mampu bertahan terhadap kemiskinan yang mereka derita dibandingkan laki-laki. Hal ini karena perempuan mempunyai cara yang jauh lebih kreatif dalam memenuhi kebutuhan mereka. Berbagai pengalaman menunjukkan bahwa dalam suatu program kredit mikro yang sama, perempuan mempunyai tendensi lebih baik dibanding pria dalam hal pengembalian pinjaman serta dalam hal dampak jangka panjang program terhadap pembangunan sumber daya manusia.

Selain itu, Coleman (1988:19) juga mengartikan modal sosial sebagai sesuatu yang memiliki dua ciri, yaitu merupakan aspek dari struktur sosial serta memfasilitasi tindakan individu dalam struktur sosial tersebut. Dalam pengertian ini, bentuk-bentuk modal sosial berupa kewajiban dan harapan, potensi informasi, norma dan sanksi yang efektif, hubungan otoritas, serta organisasi sosial yang bisa digunakan secara tepat melahirkan kontrak sosial. Dalam pandangan Coleman, modal sosial merupakan nilai dasar dari aspek-aspek struktur sosial bagi aktor sebagai sumber yang dapat digunakan untuk mencapai tujuannya.

Hal ini menunjukkan bahwa struktur sosial tidak mempunyai nilai modal sosial secara intrinsik tetapi yang membuat nilai adalah aktor. Oleh karena itu Coleman menolak determinisme struktur terhadap aktor. Pendekatan modal sosial diasumsikan pada kata modal (kapital) itu sendiri yang bermakna sebagai sumber atau modal yang dapat dikelola, dimanfaatkan dan didayagunakan secara optimal. Modal juga dipandang sebagai suatu hal yang sangat penting dalam proses investasi, yang tanpa itu tidak mungkin investasi itu dapat berjalan

Defenisi lainnya berkaitan dengan modal sosial ini dikemukakan oleh Putnam (1995), yang menyebutkan modal sosial sebagai:

“refers to feature of social organization such as network, norms, and social trust that facilitate coordination and cooperation for mutual benefit.”

Putnam (dalam Field, 2003:52-53) kemudian menjelaskan perbedaan antara dua bentuk modal sosial, yaitu:

- Menjembatani (atau *inklusif*) yang cenderung untuk menyatukan orang-orang dari berbagai ranah sosial;
- Mengikat (atau *eksklusif*) yang cenderung untuk mendorong identitas eksklusif dan mempertahankan homogenitas.

Teori modal sosial Putnam menunjukkan kesamaan yang menonjol dengan pandangan Durkheim tentang solidaritas. Putnam secara tegas menolak pemisahan yang dilakukan oleh Tonnies antara komunitas organik (*Gemeinschaft*) dengan organisasi sosial yang teratur (*Gesellschaft*). Ia berkesimpulan bahwa modernitas adalah musuh dari keberadaban.

Pendapat ini sedikit bertentangan dengan apa yang dikemukakan oleh Hasbullah (2006), bahwasanya modal sosial memiliki peranan yang penting dalam memfungsikan dan menguatkan kehidupan modern. Hal tersebut dilihat dari pemahaman dari modal sosial yang diyakini sebagai komponen penting dalam menggerakkan kebersamaan, mobilitas ide, kesalingpercayaan dan saling menguntungkan.

Beberapa defenisi tentang modal sosial di atas menjelaskan bahwa pada dasarnya masyarakat yang memiliki modal sosial tinggi akan cenderung lebih efisien dan efektif menjalankan berbagai kebijakan untuk mensejahterakan dan memajukan komunitasnya. Suatu komunitas yang memiliki modal sosial tinggi akan membuka kemungkinan menyelesaikan kompleksitas persoalan dengan lebih mudah. Hal ini memungkinkan terjadi pada masyarakat yang terbiasa hidup dengan rasa saling mempercayai yang tinggi. Komunitas yang bersatu dan memiliki hubungan ke luar lingkungan kelompoknya (eksternalitas) secara intensif dan dengan didukung oleh semangat kebajikan untuk hidup saling menguntungkan, akan merefleksikan kekuatan itu sendiri.

Modal sosial dapat diartikan sebagai karakteristik dari hubungan antar individu dalam suatu organisasi sosial maupun dengan individu di luar organisasi yang dapat berwujud kepercayaan sosial, norma dan jaringan sosial yang memungkinkan setiap individu yang ada di dalamnya untuk melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama.

Secara sederhana, Fukuyama (2002:22) mendefenisikan modal sosial sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerja sama di antara mereka. Jika para anggota kelompok itu mengharapkan bahwa anggota-anggota yang lain akan berperilaku jujur dan terpercaya, maka mereka akan saling mempercayai. Kepercayaan ibarat pelumas yang membuat jalannya kelompok atau organisasi menjadi lebih efisien.

Apabila dalam suatu kelompok masyarakat ditemukan rasa saling percaya (*trust*) dalam hubungan sosialnya, maka dalam kelompok tersebut terdapat unsur modal sosial. Kepercayaan ibarat pelumas yang membuat jalannya kelompok atau komunitas menjadi lebih efisien. *Trust* juga dapat mendorong seseorang bersedia menggunakan hasil kerja orang atau kelompok lain. *Trust* mendorong munculnya aktivitas atau tindakan bersama yang produktif atau yang menguntungkan (Soetomo, 2012b:202).

Selain kepercayaan (*trust*) yang dikemukakan Fukuyama, modal sosial yang ada dalam masyarakat memiliki banyak unsur yang mendukung dan membentuknya. Paling tidak terdapat 10 unsur dalam modal sosial (Syahra, 2000) yaitu:

- Kepercayaan (*trust*) adalah kecenderungan untuk menepati sesuatu yang telah dikatakan baik secara lisan ataupun tulisan. Hubungan yang familiar dan stabil di kalangan pelaku-pelaku sosial dalam organisasi dapat mengurangi keraguan para partisipan struktur sosial mengenai motivasi orang lain dan meredam kegelisahan akan tindakan-tindakan orang lain yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Agar orang-orang dengan kepentingan berbeda dapat bekerjasama untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah mereka tetapkan, mereka tidak hanya perlu mengetahui satu sama lain tetapi juga mempercayai satu sama lain untuk mencegah adanya eksploitasi maupun kecurangan dalam hubungan mereka.
- Solidaritas, kesediaan untuk secara sukarela ikut menanggung suatu konsekuensi sebagai wujud adanya rasa kebersamaan dalam menghadapi suatu masalah.
- Toleransi, kesediaan untuk memberikan konsensi atau kelonggaran baik dalam bentuk materi maupun non materi sepanjang tidak berkenaan dengan hal-hal yang bersifat prinsipil.
- Tanggung jawab, merupakan kesadaran untuk memenuhi kewajiban sebagai cerminan rasa peduli terhadap masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama.
- Kerjasama, merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kesediaan dari semua pihak yang terlibat memberikan kontribusi yang seimbang dalam melakukan berbagai hal yang menyangkut kepentingan bersama. Kerjasama juga merupakan upaya penyesuaian dan koordinasi tingkah laku yang diperlukan untuk mengatasi konflik ketika tingkah laku

seseorang atau kelompok dianggap menjadi hambatan oleh kelompok lain, sehingga akhirnya tingkah laku mereka bisa cocok satu sama lain.

- Kebersamaan, merupakan sikap dan perilaku yang mencerminkan adanya kesediaan untuk terlibat dalam kegiatan yang menyangkut kepentingan bersama.
- Kemandirian, merupakan sikap dan perilaku yang mengutamakan kemampuan sendiri untuk memenuhi berbagai kebutuhan tanpa tergantung kepada atau mengharap bantuan orang lain.
- Keterbukaan, merupakan kesediaan menyampaikan secara apa adanya segala hal yang orang lain yang berkepentingan menganggap bahwa mereka perlu mengetahuinya.
- Keterusterangan, merupakan kesediaan untuk menyampaikan secara apa yang sesungguhnya yang dipikirkan atau dirasakan tanpa dihalangi oleh perasaan *ewuh, pekewuh*, sungkan atau takut.
- Empati, merupakan kemampuan memahami apa yang dirasakan oleh orang lain atau kemampuan untuk menempatkan diri dalam situasi orang lain.

Sangat banyak definisi dan konsep yang ada jika kita membaca literatur-literatur yang membahas tentang modal sosial ini. Lawang (2005:210) memberikan rangkuman mengenai definisi modal sosial dari berbagai penulis yang dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut ini:

Tabel 1.1. Inti Definisi Modal (Kapital) Sosial menurut Beberapa Penulis

Penulis	Tertambat pada	Kapital Sosial (Independen)	Variabel Dependen
Coleman	Struktur Sosial: Hubungan Sosial, Institusi.	Fungsi Kewajiban, harapan, layak percaya; saluran; norma, sanksi; jaringan, organisasi.	Tindakan aktor atau aktor dalam badan hukum.
Putnam	Institusi Sosial	Jaringan;	Keberhasilan

		Norma; Kepercayaan	demokrasi, ekonomi.
Fukuyama	Agama, Filsafat	Kepercayaan, Nilai	Kerjasama keberhasilan ekonomi
Bank Dunia		Institusi, norma, hubungan	Tindakan Sosial
Turner	Hubungan Sosial, pola organisasi yang diciptakan individu	Kekuatan	Potensi perkembangan ekonomi
Lawang	Struktur sosial mikro, mezo, makro	Kekuatan sosial komunitas bersama kapital-kapital lainnya	Efisiensi dan efektifitas dalam pengatasan masalah.

Sumber: Lawang (2005:210), *Kapital Sosial: Dalam Perspektif Sosiologik Suatu Pengantar*. FISIP UI Press.

Modal sosial memiliki arti penting dalam pembangunan. Apabila pembangunan mengabaikan nilai-nilai modal sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat akan menjadi hampa, rapuh, dan pembangunan tidak akan memiliki visi yang jelas dan pada akhirnya misi dari pembangunan tersebut tidak akan tercapai. Peran modal sosial dapat dikatakan merupakan roh dari pembangunan yang berkelanjutan, artinya pembangunan berkelanjutan yang baik harus mengedepankan faktor partisipasi publik secara aktif dan hal ini dapat diperoleh dengan cara memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakat tersebut, bukan kepentingan golongan tertentu.

Banyaknya defenisi dan konsep yang dikemukakan oleh para ahli mengenai modal sosial seperti yang dipaparkan diatas, maka dalam penelitian ini penulis ingin membatasi kajian pada tiga hal dari konsep inti modal sosial yaitu: Kepercayaan, Norma dan Jaringan. Kepercayaan (*Trust*), Norma, Jaringan Sosial (*network*) yang merupakan konsep-konsep inti dalam modal sosial seperti yang diungkapkan oleh Coleman, Putnam, dan Fukuyama (dalam Lawang, 2005). Lebih lanjut Lawang menjelaskan ketiga konsep tersebut sebagai berikut:

- Kepercayaan (*Trust*). Inti dari kepercayaan antar manusia, ada tiga hal yang saling terkait yaitu:

- Hubungan sosial antara dua orang atau lebih,
- Harapan yang terkandung dalam hubungan itu, dan
- Interaksi sosial yang memungkinkan hubungan dan harapan itu terwujud.

Inti dari pemikiran ini adalah hubungan sosial dimana semakin kuat dan baik hubungan sosial, semakin tinggi harapan yang ingin diperoleh. Artinya jika kepercayaan dikaitkan dengan resiko maka: semakin tinggi saling percaya antara mereka yang bekerjasama, semakin kurang resiko yang ditanggung, dan semakin kurang pula biaya (uang atau sosial) yang dikeluarkan.

- Jaringan (*Network*). Pada prinsipnya konsep ini mengacu pada prinsip sosial dimana bekerjasama lebih mudah mengatasi masalah daripada bekerja sendiri. Jaringan yang digunakan dalam Teori Modal Sosial sebagai berikut:
 - Hubungan sosial yang diikat dengan kepercayaan,
 - Ada kerja antar simpul,
 - Mampu menahan beban bersama,
 - Tidak dapat berdiri sendiri,
 - Tidak dapat dipisahkan,
 - Ada norma yang mengatur dan menjaga.
- Norma. Norma tidak bisa dipisahkan dari jaringan dan kepercayaan. Sifat norma lebih kurang sebagai berikut:
 - Muncul dari pertukaran yang saling menguntungkan,
 - Bersifat resiprokal, artinya isi norma menyangkut hak kewajiban kedua belah pihak yang menjamin keuntungan yang diperoleh dari suatu kegiatan tertentu, dan
 - Dalam waktu lama akan memunculkan norma keadilan.

Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan merupakan terjemahan dari istilah *empowerment*. Lahirnya konsep pemberdayaan merupakan antitesa terhadap model pembangunan yang kurang memihak pada rakyat. Dalam konsep pemberdayaan yang dikemukakan Sumodiningrat (1999), pemberdayaan merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan masyarakat senantiasa mengkaitkannya dengan dua kelompok yaitu: masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan, dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Pemberdayaan merupakan konsep yang menjelaskan berbagai upaya untuk memperkuat posisi seseorang, dengan cara menumbuhkan kesadaran dan kemampuan seseorang, dengan cara mengidentifikasi persoalan-persoalan yang dihadapi dan mencari solusi untuk memecahkan persoalan tersebut. Ini berarti syarat mutlak keberhasilan pemberdayaan masyarakat adalah partisipasi masyarakat miskin yang bersangkutan. Wrihatnolo (2007), secara lebih rinci memaparkan 5 alasan mengapa program pembangunan dan pengentasan kemiskinan harus dilaksanakan dengan konsep pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- Demokratisasi proses pembangunan, dimana salah satu pendekatannya memberikan peluang sebesar-besarnya kepada lapisan masyarakat paling bawah untuk terlibat dalam pengalokasian sumberdaya pembangunan. Pemberdayaan menjadi sarana pembelajaran masyarakat untuk mengenali dan melaksanakan program sesuai dengan kebutuhannya sendiri.
- Penguatan peran organisasi kemasyarakatan lokal, dimana organisasi kemasyarakatan lokal memegang peran sentral karena dianggap sebagai lembaga terdekat yang paling mengerti kondisi masyarakat. Organisasi ini selanjutnya berperan mendampingi masyarakat miskin sebagai inisiator, katalisator, dan fasilitator.
- Penguatan modal sosial, yang mana konsep pemberdayaan sosial dapat memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat. Proses pemberdayaan akan menguatkan modal sosial, yaitu: kepercayaan, kebersamaan, kejujuran, dan kepedulian. Penguatan modal sosial ini merupakan motivasi dasar setiap kegiatan yang memacu perwujudan tujuan pemberdayaan itu sendiri dan dengan sendirinya mampu menciptakan kultur masyarakat yang mandiri dan hubungan yang harmonis dalam masyarakat.
- Penguatan kapasitas birokrasi, dimana konsep pemberdayaan diyakini dapat meningkatkan fungsi pelayanan publik dan pemerintah khususnya kepada penduduk setempat. Dalam proses pemberdayaan, masyarakat akan semakin cerdas karena diikuti dalam proses pembangunan. Pada akhirnya masyarakat akan mampu memaksa para birokrat dan penyelenggara negara untuk lebih memahami dan melayani rakyatnya dengan lebih baik.

- Mempercepat penanggulangan kemiskinan, dimana konsep pemberdayaan dapat mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Dalam konsep ini pemerintah dan organisasi kemasyarakatan dituntut untuk memberikan pemihakan dan perlindungan kepada masyarakat miskin dengan cara senantiasa mengalokasikan sumberdaya pembangunan untuk masyarakat miskin. Peran pendamping sangat dibutuhkan untuk memastikan masyarakat miskin dapat mengakses seluruh sumber daya termasuk sumber daya ekonomi.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memampukan dan memandirikan masyarakat. Menurut Suharto (2006), pemberdayaan merupakan upaya mentransformasikan kesadaran masyarakat, sehingga masyarakat mau dan mampu mengambil bagian secara aktif untuk mendorong terjadinya perubahan. Wrihatnolo (2007) berpendapat bahwa penerapan pemberdayaan banyak digunakan dalam program pembangunan karena pemberdayaan dapat memberikan ruang partisipasi lebih luas kepada masyarakat dalam proses pembangunan.

Arnstein (1969) menawarkan suatu teori yang disebut dengan teori *The Ladder of Participation* yaitu suatu *gradasi* atau pentahapan partisipasi masyarakat. Ia menjelaskan delapan tingkatan partisipasi masyarakat dari yang tertinggi sampai terendah. Delapan tingkatan tersebut merupakan tangga atau jenjang peran serta atau disebut juga tangga partisipatif (*A Ladder of Citizen Participation*) yang menunjukkan tingkatan partisipatif. Kedelapan tingkatan tersebut adalah:

- Kontrol sosial (*Citizen Control*)
- Pendelegasian (*Delegated Power*)
- Kemitraan (*Partnership*)
- Penentraman (*Placation*)
- Konsultasi (*Consultation*)
- Informasi (*Informing*)
- Terapi (*Therapy*)
- Manipulasi (*Manipulation*)

Delapan tahapan partisipasi Arnstein tersebut, dapat dikategorikan menjadi 3 yaitu: *Non Participation*, *Tokenism*, dan *Citizen Power*. Termasuk dalam kategori *Non Participation* adalah *therapy* dan *manipulation*. *Placation*, *Consultation*, dan *Informing* masuk dalam kategori *Tokenism*. Sisanya masuk dalam kategori *Citizen Power* yaitu: *Citizen Control*, *Delegated Power*, dan *Partnership*.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan merupakan sebuah kegiatan yang menekankan pada proses dan tujuan. Sebagai suatu proses, pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu: masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan tidak hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti: kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan. Demikian pula dengan pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya (Mardikanto dan Soebiato, 2012).

Berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, dalam Pedoman Pemberdayaan Perempuan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (2006:8-9), dijelaskan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan serangkaian upaya-upaya kemampuan perempuan untuk memperoleh akses kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi sebagai pelaku dalam pengelolaan pembangunan, serta kontrol terhadap sumberdaya ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lingkungan agar perempuan dapat mengatur dirinya untuk mampu berperan dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Kegiatan ini merupakan upaya untuk mewujudkan kesetaraan peran, akses, dan kontrol perempuan dan laki-laki disemua bidang pembangunan. Program-program pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat selama ini merupakan upaya untuk senantiasa mewujudkan terciptanya dan terdistribusinya manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan secara berimbang.

Kebijakan pemerintah melalui kredit mikro bagi perempuan dalam program SPP PNPM-MP, dimaksudkan agar perempuan yang selama ini cenderung pasif dan termarginalisasikan menjadi lebih berdaya. Karena itu prioritas dan upaya tetap harus ditujukan kepada hasil akhir agar perempuan lebih berdaya dan tidak hanya tergantung kepada para suami atau saudara laki-laki mereka melainkan mampu menentukan apa yang terbaik untuk dirinya. Dengan adanya kredit mikro melalui program SPP ini perempuan miskin diharapkan dapat terhindar dari rentenir dan memiliki kemandirian ekonomi.

Program kredit mikro untuk perempuan mengarah pada pemberdayaan ekonomi perempuan, dalam hal ini akan lebih jauh mengarah pada pemberdayaan sosial, politik dan hukum dan pada akhirnya berkontribusi pada pembentukan *social capital* atau modal sosial yaitu dengan melalui berkembangnya jaringan antar mereka (Mahmud, 2003). Dalam kegiatan pemberdayaan perempuan, Suharto (2006) berpendapat modal sosial yang baik ditandai dengan adanya lembaga sosial yang kokoh dan hubungan antar anggota dan masyarakat yang harmonis. Mayoux (1999) berpendapat bahwa akses terhadap kredit mikro untuk perempuan mempunyai efek penting terhadap proses pemberdayaan perempuan. Menurutnya kredit mikro mengimplikasikan tiga hal, yaitu keberlanjutan keuangan yang mandiri, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan para feminis.

PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)

Berdasarkan Buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2009 menyatakan bahwa visi PNPM-MP adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu

mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Program pemerintah yang bersifat *top down* telah dikoreksi oleh program yang berasal dari masyarakat yang bersifat *botton up*. PNPM-MP telah mengakomodir aspirasi-aspirasi masyarakat bawah, memberi kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi, dan melakukan evaluasi. Melalui salah satu program kerja PNPM-MP adalah penyediaan dana bergulir, masyarakat dapat memanfaatkan dana tersebut untuk mengembangkan usaha-usaha yang telah dimiliki. Dana bergulir tersebut dipergunakan untuk pembiayaan masyarakat yang memiliki Usaha-Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di mana pelakunya masyarakat umum, dan pembiayaan untuk khusus kaum perempuan yang memiliki usaha yang disebut Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (Kelompok SPP).

Pengembangan kelompok SPP diarahkan sebagai lembaga pengelola simpanan dan pinjaman yang profesional, akuntabel sehingga mampu menarik minat kerjasama lembaga lain sebagai lembaga penyalur dan pengelola pinjaman. Pengembangan kelembagaan kelompok SPP, secara badan hukum dapat menjadi Koperasi Simpan Pinjam. Fasilitasi pengembangan kelompok dapat didasarkan pada tingkat perkembangan kelompok maupun fungsi kelompok yang dijelaskan dalam pengelolaan dana bergulir.

• Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif. Penelitian kualitatif berusaha menggali, menemukan, mengungkapkan, dan menjelaskan makna dan pola objek penelitian yang diteliti secara holistik. Makna dapat dipahami sebagai fungsi, nilai, norma, dan kearifan lokal, sedangkan pola dapat dipahami sebagai kaidah, struktur, dan formula. Kedua hal itulah yang menjadi tujuan akhir penelitian kualitatif. Pola, kaidah, aturan, dan makna yang ditemukan muncul dari bawah, berasal dari sejumlah besar satuan bukti yang saling berhubungan, ini yang kemudian disebut *grounded theory* (teori dasar) terutama mengenai modal sosial dan pemberdayaan yang ada dalam masyarakat.

Berknaan dengan penelitian modal sosial secara kualitatif, perlu dicermati dan dijawab lima pertanyaan yang diajukan Cresswell (1994). Pertama, secara *ontologis* apa hakikat realitas modal sosial? Kedua, secara *epistemologis* bagaimana hubungan antara peneliti dengan modal sosial dalam masyarakat yang ditelitinya? Ketiga, secara *aksiologis* apa peran nilai-nilai yang

melatarbelakangi modal sosial yang ada di masyarakat? Keempat, secara *retoris* bagaimana bahasa dalam penelitian modal sosial? Kelima, secara *metodologis* bagaimana proses penelitian modal sosial? Dalam penelitian modal sosial ini, paradigma penelitian kualitatif menginspirasi dan mewarnai penelitian mulai dari proses pengumpulan data sampai pada proses analisis data dan bahkan sampai pada proses pengembangan unsur-unsur modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat.

Informan, Populasi dan Sample Penelitian

Adapun informan kunci pada penelitian ini melibatkan sejumlah informan kunci yang dipilih secara sengaja (*puposive*) berdasarkan pertimbangan tujuan penelitian, serta informasi dari beberapa informan itu sendiri. Teknik *snowball* digunakan untuk menentukan informan selanjutnya dari informan kunci.

Adapun informasi yang diperoleh dalam penelitian ini digali dari beberapa pihak, antara lain:

- Orang-orang yang dianggap memahami dengan baik tentang berbagai fakta, fenomena, dan persoalan masyarakat seperti: Fasilitator PNPM Mandiri, aparat desa, tokoh masyarakat, dan penerima manfaat dari PNPM Mandiri Perdesaan (kelompok-kelompok usaha),
- Orang-orang yang terlibat secara langsung dalam berbagai peristiwa/kejadian, aktifitas sosial ekonomi masyarakat seperti: anggota kelompok, pengurus kelompok, dan jaringan usaha,
- Orang-orang yang dianggap memiliki pandangan luas dan dapat mengambil jarak sehingga mampu memberikan informasi secara objektif seperti: pendamping/fasilitator dan aparat pemerintah daerah yang terkait,
- Orang-orang yang memiliki kesediaan dan waktu untuk memberikan pandangan-pandangan dan informasi, dan
- Orang-orang yang dianggap tepat untuk memberikan informasi sesuai dengan data/informasi yang diinginkan peneliti.

Selain pengumpulan data secara kualitatif, dalam penelitian ini juga dilakukan pengumpulan data secara kuantitatif. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan melalui sampel penelitian. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Secara purposif dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa karakteristik tertentu sesuai dengan

tujuan penelitian. Karakteristik tersebut antara lain: merupakan anggota kelompok SPP. Dengan menggunakan teknik survey didapat sebanyak 206 responden yang kesemuanya merupakan anggota dari 22 kelompok SPP yang terdapat di Kecamatan Dolok Merawan.

• **Karakteristik Responden**

Usia Responden

Uraian mengenai karakteristi responden berdasarkan usia di dapat dari sebaran kuesioner pada 206 orang responden penelitian yang keseluruhannya merupakan anggota kelompok SPP. Kategori responden menurut umur dapat dilihat pada Table 5.1.

Tabel 1.2. Usia Responden

No.	Usia Responden	Jumlah (orang)	Persentase
1	18 - 25 tahun	10	4,85
2	26 - 35 tahun	88	42,72
3	36 - 45 tahun	50	24,27
4	46 - 55 tahun	38	18,45
5	56 - 65 tahun	17	8,25
6	66 tahun keatas	3	1,46
Jumlah		206	100,00

Sumber: Data Kuesioner

Data pada Tabel 1.2. dapat dilihat bahwa yang menjadi responden sekaligus terlibat dalam kelompok SPP ini adalah mereka yang masih dalam usia produktif (26 tahun sampai dengan 55 tahun) yaitu sebanyak 85,44%. Sedangkan yang usia non produktif diatas 66 tahun ke atas sangat sedikit jumlahnya, yaitu 1,46%.

Agama Responden

Mayoritas agama yang dianut responden adalah Islam sebanyak 189 orang (91,70%). Sebagian lainnya beragama Kristen yaitu sebanyak 17 orang (8,30%). Kehidupan beragama dengan hubungan toleransi antar umat beragama dalam masyarakat berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari praktek-praktek ibadah yang

dijalankan masing-masing umat beragama selama ini dapat berjalan dengan baik tanpa halangan atau gangguan dari umat yang berbeda agama. Lebih jelasnya kondisi mengenai agama responden dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 1.3. Agama Responden

No	Agama	Jumlah (orang)	Persentase
1	Islam	189	91,70
2	Kristen	17	8,30
Jumlah		206	100,00

Sumber: Data Kuesioner

Selain kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing, dalam beberapa kelompok SPP yang ada, keberagaman agama ini juga muncul. Artinya dalam satu kelompok SPP ini tidak hanya mengelompok berdasarkan agama, ada juga kelompok SPP yang berbaur dengan agama lainnya. Kelompok-kelompok SPP yang berbaur dari agama yang berbeda terdapat di Desa Naga Raja I, (Kelompok SPP Belimbing I dan III), Desa Pabatu I (Kelompok Bougenfil dan Anggrek), Desa Gunung Para II (Kelompok Melon dan Dahlia), dan Desa Pabatu VI (Kelompok Nenas).

Mengutip pendapat Fukuyama (2000) yang menyatakan bahwa di mana pada kelompok sosial yang biasanya terbentuk secara tradisional atas dasar kesamaan kepercayaan, pada dimensi ketuhanan (*religious beliefs*) cenderung memiliki kohesivitas tinggi, tetapi rentang jaringan yang terbangun sangat sempit.

Pendidikan Responden

Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh responden, pada umumnya tingkat pendidikan responden menamatkan SLTA/ sederajat, yaitu sebanyak (38,80%) dan SLTP/ sederajat sebanyak (35,40%). Lebih jelasnya kondisi mengenai tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada Tabel 5.3.

Tabel 1.4. Tingkat Pendidikan Responden

No	Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase
1	Tidak Tamat SD	19	9,20
2	Tamat SD	31	15,00
3	Tamat SLTP/Sederajat	73	35,40
4	Tamat SLTA/Sederajat	80	38,80
5	Tamat Akademi (Diploma)	1	0,50
6	Sarjana	2	1,00
Jumlah		206	100,00

Sumber: Data Kuesioner

Kondisi perempuan di dalam ranah publik masih terjebak di dalam peran tradisional mereka, meskipun kaum perempuan telah memiliki kemajuan di bidang pendidikan. Perempuan masih tetap dalam peran tradisional sebagai ibu rumah tangga.

Pekerjaan Responden

Pada umumnya jenis pekerjaan responden adalah wiraswasta sebanyak 60 orang (29,10%) , kemudian pegawai swasta sebanyak 20 orang (9,70%) dan petani sebanyak 10 orang (4,90%) dan pedagang hanya 1 orang (0,50%). Jenis pekerjaan yang tidak dapat dikelompokkan dimasukkan menjadi jenis pekerjaan lainnya sebanyak 115 orang (55,80%). Kategori lainnya ini umumnya diisi dengan jawaban bekerja sebagai ibu rumah tangga.

Dilihat dari komposisi jenis pekerjaan yang dilakukan oleh responden merupakan kelompok yang menjadi sasaran dari kegiatan SPP, dimana yang menjadi sarannya adalah perempuan rumah tangga miskin yang memiliki usaha. Lebih jelasnya kondisi mengenai jenis pekerjaan responden dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 1.5. Jenis Pekerjaan Responden

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (orang)	Persentase
1	Pegawai Swasta	20	9,70
2	Pedagang	1	0,50
3	Petani	10	4,90
4	Wiraswasta	60	29,10
6	Lainnya	115	55,80
	Jumlah	206	100,00

Sumber: Data Kuesioner

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh perempuan sebagai bagian dari kelompok SPP masih tergolong dalam dalam skala usaha kecil-mikro. Ciri-ciri dari kegiatan usaha kecil mikro ini antara lain adalah: usaha dengan modal usaha yang terbatas jumlahnya, pendapatan dari usaha tersebut tergolong kecil, umumnya masih menggunakan tenaga kerja yang berasal dari anggota keluarga yang berada dalam rumah tangga tersebut.

Kalau dilihat jenis usaha yang dilakukan oleh kelompok SPP yang ada saat ini, secara umum jenis usaha yang dilakukan adalah: berjualan gorengan, berjualan kedai sampah (bahan sembako), berjualan pulsa, beternak lele, beternak ayam, menjual bensin eceran, berjualan di kantin sekolah, penjahit pakaian, usaha peminjaman teratak, dan usaha salon.

Suku Bangsa Responden

Faktor toleransi beragama dan hubungan antar suku bangsa merupakan cerminan dari sikap toleransi di antara sesama anggota masyarakat untuk melaksanakan ibadah dan mendirikan tempat ibadah serta bertetangga dengan warga yang berbeda agama dan suku bangsa. Unsur ini mempunyai kontribusi yang besar dalam pembentukan faktor modal sosial.

Responden dalam penelitian ini terdiri dari terdiri dari berbagai suku bangsa. Masyarakat di sini sudah terbiasa hidup bersama dalam keberagaman. Berdasarkan suku bangsa, responden penelitian terbanyak adalah berasal dari suku Jawa (72,30%), Simalungun (8,70%), Mandailing (6,30%) dan Toba (5,30%).

Kondisi ini tidak terlepas dimana pada daerah penelitian, suku-suku inilah yang banyak berdiam daerah ini, baik sebagai orang yang sudah lama di daerah ini, maupun sebagai masyarakat pendatang. Kondisi responden menurut suku bangsa dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 1.6. Suku Bangsa Responden

No	Suku Bangsa	Jumlah (orang)	Persentase
1	Jawa	149	72,30
2	Toba	11	5,30
3	Mandailing	13	6,30
4	Karo	3	1,50
5	Simalungun	18	8,70
6	Minang	3	1,50
7	Melayu	7	3,40
8	Nias	2	1,00
Jumlah		206	100,00

Sumber: Data Kuesioner

• Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian kualitatif, pengumpulan datanya menerapkan tiga metode pengumpulan data yang lazim untuk penelitian kualitatif, yakni wawancara mendalam dan terbuka (*in-depth, open-ended interview*), observasi partisipatoris dan langsung (*direct, partisipatory observation*), dan dokumen tertulis (*written dokumen*).

Metode wawancara mendalam dan terbuka dilakukan secara *purposive sampling* kepada para informan terpilih untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dengan teknik ini sumber informasi atau informan dipilih berdasarkan kriteria informatif, informasi subjektif berdasarkan pemikiran yang rasional dan pendapat orang yang ahli, serta penyidikan suatu kasus secara mendalam (Neuman, 2000: 198).

Wawancara mendalam dan terbuka ini dilakukan kepada informan yang memiliki pemahaman tentang kegiatan kelompok perempuan dalam unit simpan pinjam perempuan (SPP), dan juga masyarakat yang sering terlibat dalam kegiatan kelompok simpan pinjam perempuan (SPP). Hasil wawancara ini direkam dan dicatat sehingga tidak ada informasi yang tertinggal. Sesuai dengan kriteria pendekatan kualitatif, jumlah informan ditentukan berdasarkan kepada, kecukupan, dan keakuratan data sehingga jika tidak terdapat lagi informasi baru (*redundant*) pada informan tertentu, maka pencarian informasi dari informan dicukupkan sampai di situ.

Metode observasi partisipatoris dan langsung diterapkan terutama dalam mendapatkan data untuk menjawab pertanyaan tentang pengembangan unsur-unsur modal sosial dalam upaya pemberdayaan perempuan.

Metode dokumen tertulis diperlukan dalam pengumpulan data ini terutama mendapatkan informasi tentang modal sosial dan pemberdayaan perempuan yang mungkin ada disimpan masyarakat sehingga memudahkan untuk menyusun dan melengkapi data-data dari lapangan.

Meskipun mengutamakan bentuk studi kualitatif (*qualitative research*), namun dukungan data-data kuantitatif juga merupakan komponen yang penting. Pendekatan kualitatif dijadikan sebagai pendekatan yang utama (*qualitative-dominant*) dalam penelitian ini, sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan sebagai pengontrol/pendukung (*quantitative-less dominant*) saja.

Data kuantitatif diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang telah dikembangkan oleh Bank Dunia yaitu *Social Capital Integrated Questioner (SCIQ)* untuk mengukur modal sosial komunitas (Grootaert, et.al: 2004). Secara khusus *SCIQ* memasukkan enam dimensi khusus modal sosial, yaitu: kelompok dan jaringan (*groups and network*), kepercayaan dan solidaritas (*trust and solidarity*), tindakan kolektif dan kerjasama (*collective action and cooperation*), informasi dan komunikasi (*information and communication*), kohesi sosial dan inklusi (*social cohesion and inclusion*), penguatan dan tindakan politik (*empowerment and political action*).

Defenisi Konsep dan Operasional

Defenisi Konsep

Adapun definisi konsep dalam penelitian ini adalah:

- Modal Sosial (*Social Capital*) merupakan struktur hubungan yang menjadi modal dalam pencapaian tujuan hidup, dimana struktur tersebut diwujudkan dalam bentuk kelembagaan, partisipasi, adat istiadat dan bentuk sosial lainnya yang difasilitasi oleh rasa saling mempercayai.
- Jaringan Sosial merupakan kemampuan sekelompok orang dalam suatu asosiasi atau perkumpulan dalam melibatkan diri dalam suatu jaringan hubungan sosial.
- *Resiprocity* adalah kecendrungan saling tukar kebaikan antar individu dalam suatu kelompok atau antar kelompok itu sendiri. Pola pertukaran ini bukanlah sesuatu yang dilakukan secara resiprokal seketika seperti dalam proses jual beli, melainkan suatu kombinasi jangka pendek dan jangka panjang.

- *Trust* atau rasa percaya (mempercayai) adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung.
- Norma Sosial merupakan sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu.

Defenisi Operasional

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

- Karakteristik kelompok, yaitu: jumlah keanggotaan, kontribusi uang, frekuensi keterlibatan, partisipasi dalam pengambilan keputusan, keragaman keanggotaan, dan sumber dana organisasi.
- Kebersamaan, dilihat dari: bagaimana orang-orang bergaul, dan rasa kebersamaan orang-orang.
- Hubungan keseharian dengan tetangga, yang meliputi: meminta tetangga menjaga anak ketika sakit, dan meminta tolong tetangga pada saat sakit.
- Kepercayaan, meliputi: kepercayaan di dalam keluarga, kepercayaan pada tetangga, kepercayaan pada orang dari suku yang berbeda, kepercayaan pada pemilik usaha, kepercayaan kepada pegawai pemerintah, kepercayaan kepada aparat, kepercayaan pada layanan pemerintah, dan kepercayaan kepada pemerintah daerah.
- Norma, berkaitan dengan: sikap menolong orang-orang, sifat bisa dipercaya (*trustworthiness*), dan sifat adil (*fairness*) orang-orang.

• Bingkai Analitik

Bingkai analisis dalam tulisan ini mengikuti langkah-langkah Miles dan Huberman (1992), yakni:

- *Data collection* (pengumpulan data), yakni mengumpulkan data berupa kata-kata dengan cara wawancara, pengamatan, intisari dokumen, perekaman, dan pencatatan;
- *Data reduction* (reduksi data), yakni merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu;
- *Data display* (penyajian data), yaitu memperlihatkan data dan menyajikannya dalam bentuk teks yang bersifat naratif atau bagan;
- *Conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan/verifikasi), yakni penarikan kesimpulan dan verifikasi terhadap temuan-temuan penelitian.

Gambar 3.1. Komponen Analisis Data Model Interaktif (Interaktif Model)

Sumber: Miles dan Haberman, 1992 (dalam Salim:22). Teori dan Paradigma Penelitian Sosial. Tiara Wacana, 2006.

Setiap informasi yang didapat, direkam dalam catatan lapangan, baik itu data utama hasil wawancara maupun dari data penunjang lainnya. Setelah seluruh data terkumpul, maka dilakukan analisa data. Analisis data dilakukan secara simultan dengan proses pengumpulan data (*on going analysis*).

Seluruh data tersebut akan dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan, lalu data dipisahkan secara kategorial dan dicari hubungan yang muncul dari data, yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu analisis data yang baik yang dapat mengungkapkan permasalahan dari penelitian yang dilakukan.

Sedangkan hasil observasi akan diuraikan dimaksudkan untuk memperkaya hasil wawancara sekaligus melengkapi data. Berdasarkan data yang diperoleh akan diinterpretasikan untuk menggambarkan dengan jelas keadaan yang ada.

Model analisis yang digunakan adalah analisa deskriptif yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 2007:67).

Analisan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2007:68).

Analisis deskriptif ini menjelaskan dan menggambarkan tentang apa yang diteliti dan berusaha mendapatkan data sebanyak mungkin sehingga dapat memberikan suatu gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi pokok permasalahan, yaitu mengetahui bagaimana modal sosial berperan dalam pemberdayaan perempuan serta bagaimana upaya pemberdayaan perempuan melalui pengembangan unsur-unsur modal sosial.



BAB II

POTRET KEHIDUPAN MASYARAKAT

• Kondisi Geografis

Kabupaten Serdang Bedagai merupakan salah satu kabupaten dari hasil pemekaran Kabupaten Deli Serdang sebagai induk sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tertanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai.

Kabupaten Serdang Bedagai memiliki area seluas 1.900,22 Km² (190.022 Ha) yang terdiri dari 17 Kecamatan, 236 Desa dan 7 Kelurahan. Ibukota Kabupaten Serdang Bedagai terletak di Kecamatan Sei Rampah yaitu Kota Sei Rampah.

Potensi Ekonomi yang dimiliki Kabupaten Serdang Bedagai terutama dari sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa, pariwisata dan sebagainya. Potensi-potensi ekonomi yang ada antara lain :

- Kawasan Industri dan Perdagangan Makanan Pasar Bengkel di Kecamatan Perbaungan;
- Kawasan Perdagangan di Kecamatan Perbaungan;
- Kawasan Pariwisata *Theme Park* di Kecamatan Pantai Cermin,
- Wisata Kuliner pada daerah-daerah pesisir pantai;

Kecamatan Dolok Merawan, merupakan satu dari 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai, berjarak ± 40 km dari pusat pemerintahan kabupaten. Memiliki ketinggian ± 114 meter dari permukaan laut dengan suhu maximum 32⁰ c, yang terdiri dari musim hujan dan musin kemarau dengan curah hujan pada musim penghujan terbanyak pada bulan Agustus sampai dengan bulan Desember. Sedangkan musin kemarau terjadi antara bulan Januari sampai dengan bulan Juli.

Kecamatan Dolok Merawan beribukota di Desa Dolok Merawan dengan luas wilayah ± 12,06 km². Kecamatan ini terletak diantara Kota Tebing Tinggi dan Pematang Siantar. Secara administratif, Kecamatan Dolok Merawan berbatasan dengan beberapa daerah di sekitarnya, yaitu :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Tebing Tinggi,
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Simalungun,
- Sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Batubara,

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sipispis.

Kecamatan ini memiliki 17 desa, 5 diantaranya merupakan desa murni, 2 desa campuran dan 10 desa merupakan desa perkebunan. Wilayah Kecamatan Dolok Merawan sebagian besar merupakan daerah perkebunan sawit dan karet milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

• **Kondisi Demografis**

Jumlah penduduk Kecamatan Dolok Merawan pada Oktober 2014, ada sebanyak 17.715 orang dengan rincian 8.920 orang laki-laki dan 8.795 orang perempuan. Kesemuanya terdiri dari 4.894 kepala rumah tangga. Lebih jelasnya komposisi penduduk berdasarkan umur dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Dari Tabel 4.2. dapat dilihat bahwa proporsi penduduk golongan muda (0-16 tahun) sebanyak 33,39 %, penduduk *intermediate* (17-59 tahun) mencapai 59,83% dan usia lanjut usia (lansia) sebanyak 6,78%. Secara umum, data pada Tabel 4.2. memperlihatkan bahwa penduduk di Desa Dolok Merawan secara keseluruhan tergolong dalam kelompok penduduk berumur menengah (*intermediate*).

• **Struktur Mata Pencaharian**

Di samping struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur, perlu pula diketahui struktur penduduk di kecamatan ini berdasarkan mata pencaharian. Dilihat dari struktur mata pencaharian penduduknya, kebanyakan penduduk angkatan kerja di Kecamatan Dolok Merawan bekerja di sektor non pertanian, seperti: karyawan (29,79%) dan wiraswasta (16,20%). Pekerjaan disektor pertanian yaitu sebagai petani (20,55%) dan buruh (14,43%). Selebihnya ada yang bekerja sebagai PNS dan bidang jasa lainnya.

• **Kondisi Pendidikan**

Berdasarkan data yang ada dalam Profil Kecamatan Dolok Merawan tahun 2014, dapat diketahui jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan. Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah penduduk yang berpendidikan SD dan sederajat merupakan jumlah terbesar yakni sebanyak 5.054 orang, sedangkan urutan kedua adalah tamatan SMA dengan jumlah 3.628 orang, kemudian

berturut-turut adalah lulusan SMP 3.4.08 orang, Diploma 152 orang, Sarjana 219 orang dan tingkat pendidikan S2 sebanyak 2 orang.

Data berkaitan dengan tingkat pendidikan masyarakat ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Dolok Merawan masih tergolong rendah, karena sebanyak 38,76% penduduknya berpendidikan Sekolah Dasar. Selanjutnya tingkat pendidikan SLTA sebanyak 27,83% dan tingkat pendidikan SLTP sebanyak 26,14%. Tingkat pendidikan ini seringkali dijadikan sebagai ukuran terhadap kemajuan suatu masyarakat dan struktur mata pencaharian yang ada dalam masyarakat tersebut.

Berbagai sarana pendidikan tersedia di Kecamatan Dolok Merawan, mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama, dan Sekolah Menengah Tingkat Atas. Fasilitas ini beragam, mulai dari yang dimiliki swasta, negeri, maupun oleh pihak perkebunan yang ada di sekitar Kecamatan Dolok Merawan.

• **S u k u**

Selain berdasarkan jenjang atau tingkat pendidikan, masyarakat Kecamatan Dolok Merawan juga terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Sebagian besar penduduk yang ada berasal dari suku Jawa (74,52%), Simalungun (8,49%), Batak (8,48%) dan suku lainnya. Suku Jawa yang ada di daerah ini tidak terlepas dari kondisi daerah perkebunan, dimana pada masa lalu daerah perkebunan didominasi oleh pekerja yang berasal dari daerah Jawa yang dikenal dengan istilah kuli kontrak. Selain itu daerah ini juga berdekatan dengan Kota Pematang Siantar dimana di sini didominasi oleh Etnis Simalungun dan juga Etnis Batak. Sehingga ketiga etnis inilah yang mendominasi di Kecamatan Dolok Merawan ini.

A g a m a

Penduduk Kecamatan Dolok Merawan sebagian besar menganut agama Islam (91,83%). Sebagian kecil lainnya beragama Kristen (7,83%), dan yang beragama Budha sebanyak (0,34%). Sejumlah sarana peribadatan yang menunjang untuk menjalankan ibadah agama masing-masing juga tersedia di Kecamatan ini, seperti Mesjid, Gereja dan Klenteng.

• **Program PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Dolok Merawan**

Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Dolok Merawan sudah dilaksanakan sejak tahun 2009, dimana pada awal pergulirannya jumlah dana yang dikucurkan sebesar Rp.830.000.000; untuk kegiatan fisik dan dan Rp.70.000.000; untuk kegiatan non fisik. Jumlah dana yang diterima dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan ini juga mengalami fluktuasi dari tahun 2009 sampai dengan 2013. Terakhir tahun 2014 jumlah penerimaan dana kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan ini sebesar Rp.1,835,541,000 dan kesemuanya dikucurkan untuk kegiatan fisik. Lebih jelasnya besaran dana PNPM Mandiri Perdesaan yang diterima Kecamatan Dolok Merawan dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Dana untuk kegiatan Proyek Fisik digunakan untuk kegiatan berupa pengerasan jalan, pengerasan jalan *telford*, pengerasan jalan *Material Base B*, pembangunan saluran parit dan gorong-gorong, serta pembangunan jembatan. Kegiatan Proyek Non Fisik disalurkan pada kegiatan BLM dan kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan.

Gambar 2.1. Penerimaan Dana PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Dolok Merawan Tahun 2009-2013

Sumber: PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Dolok Merawan

Tujuan utama dari pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan adalah penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem, serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Di Kecamatan Dolok Merawan ini berdasarkan pendataan Rumah Tangga Miskin (RTM) yang dilakukan oleh PNPM Mandiri Perdesaan terdapat sebanyak 495 Rumah Tangga Miskin dan 123 merupakan Rumah Tangga Sangat Miskin. Kriteria yang digunakan untuk menentukan kemiskinan tersebut antara lain: pekerjaan tidak menetap, memiliki penghasilan di bawah Rp.700.000; per bulan, rumah yang ditempati bukan milik sendiri atau rumah tersebut masih menggunakan dinding tebas, lantai tanah dan beratapkan

rumbia, penerangan rumah tidak menggunakan penerangan listrik melainkan lampu teplok, dan lainnya.

Kemiskinan menurut kriteria yang dikeluarkan oleh BPS tahun 2007, menggunakan 14 variabel/kriteria untuk mengkategorikan penduduk miskin. Variabel atau kriteria tersebut adalah: luas lantai bangunan; jenis lantai bangunan yang digunakan; jenis dinding yang digunakan; tidak adanya jamban/toilet; ada tidaknya sumber penerangan rumah tangga; sumber air minum; jenis bahan bakar yang digunakan untuk memasak sehari-hari; jumlah konsumsi daging, susu dan ayam; pengeluaran untuk barang sandang; tingkat konsumsi makanan; pengeluaran untuk kesehatan; jumlah penghasilan kepala rumah tangga; dan jumlah tabungan yang dimiliki. Seseorang yang dikategorikan miskin oleh BPS jika memenuhi minimal 8 dari 14 kriteria atau variabel tersebut.

Sesuai dengan Visi PNPM Mandiri Perdesaan yaitu tercapainya kesejahteraan dan kemandirian rakyat miskin di perdesaan. Kesejahteraan dimaknai sebagai terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian diartikan juga sebagai kemampuan untuk mengorganisir diri untuk memobilisasi sumberdaya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumberdaya di luar lingkungannya, serta mengelola sumberdaya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Dalam mendukung visinya, misi yang dilakukan oleh PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebagai berikut:

- Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya
- Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif
- Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal
- Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat
- Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Pencapaian visi dan misi ini dilakukan dengan strategi yang dikembangkan dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan Rumah Tangga Miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerjasama antar desa.

Kegiatan PNPM Mandiri dilaksanakan dengan memilih pada upaya pemberdayaan sebagai sebuah pendekatan. Hal ini sesuai dengan pengertian Pemberdayaan Masyarakat yang dikemukakan oleh Tim Pengendali PNPM Mandiri yaitu sebagai sebuah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok dalam memecahkan berbagai persoalan

terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui perubahan perilaku masyarakat, dengan pendekatan pemberdayaan atau proses pembelajaran masyarakat dan penguatan kapasitas untuk mengedepankan peran pemerintah daerah dalam mengapresiasi dan mendukung kemandirian masyarakat.

Pada pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestariannya, masyarakat merupakan pelaku utamanya. Sedangkan yang lainnya mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya hanya berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing, dan pembina agar tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme yang ada dalam PNPM Mandiri Perdesaan dapat tercapai dan terlaksana secara benar dan konsisten.

Pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri yang dilakukan oleh masyarakat didampingi oleh Fasilitator Kecamatan. Adapun tugas Fasilitator Kecamatan adalah pendamping masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan. Peran Fasilitator Kecamatan adalah memfasilitasi masyarakat dalam setiap tahapan PNPM Mandiri Perdesaan, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian. Selain itu juga berperan dalam membimbing kader-kader desa atau pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di desa dan kecamatan. Struktur Pengurus PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Dolok Merawan dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Berdasarkan struktur yang ada dalam PNPM Mandiri Perdesaan, maka tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bagian dalam struktur tersebut sebagai berikut:

- Fasilitator Kecamatan. Tugas Fasilitator Kecamatan adalah memfasilitasi masyarakat dalam setiap tahapan PNPM Mandiri Perdesaan, selain itu berperan dalam mendampingi kader-kader desa atau pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di desa dan kecamatan.
- BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa). Tugas BKAD adalah merumuskan, membahas, dan menetapkan rencana strategis untuk pengembangan UPK dalam bidang pengelolaan dana bergulir, pelaksanaan program dan pelayanan usaha kelompok. BKAD juga berperan dalam pengawasan, pemeriksaan, serta evaluasi kinerja UPK.
- Badan Pengawas UPK (BP-UPK). BP-UPK berperan dalam mengawasi pengelolaan kegiatan, administrasi dan keuangan

yang dilakukan oleh UPK, BP-UPK dibentuk melalui musyawarah antar desa, terdiri dari tiga orang.

- Tim Verifikasi (TV). Tugas TV adalah melakukan pemeriksaan serta penilaian usulan kegiatan semua desa peserta PNPM Mandiri Perdesaan dan selanjutnya membuat rekomendasi kepada musyawarah antar desa sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan.
- Unit Pengelola Kegiatan (UPK). UPK berperan sebagai unit pengelola dan operasional pelaksanaan kegiatan antar desa. Pengurus UPK terdiri dari :
 - Ketua. Tugas ketua adalah mensosialisasikan kepada anggota, bertanggung jawab terhadap kelancaran pembayaran dan pembukuan.
 - Sekretaris. Tugas sekretaris yakni membantu ketua kelompok melaksanakan tugas-tugas administrasi, memperbaharui informasi dan laporan penggunaan dana, dan mengadministrasikan dan mengarsipkan seluruh dokumen dan berkas.
 - Bendahara. Tugas bendahara yakni menyimpan dan menjaga uang kas, menyiapkan kwitansi-kwitansi setiap pembayaran, dan melaksanakan pencatatan pada buku kas (PTO PNPM Mandiri Perdesaan, 2009).

Gambar 2.2. Struktur Pengurus PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Dolok Merawan

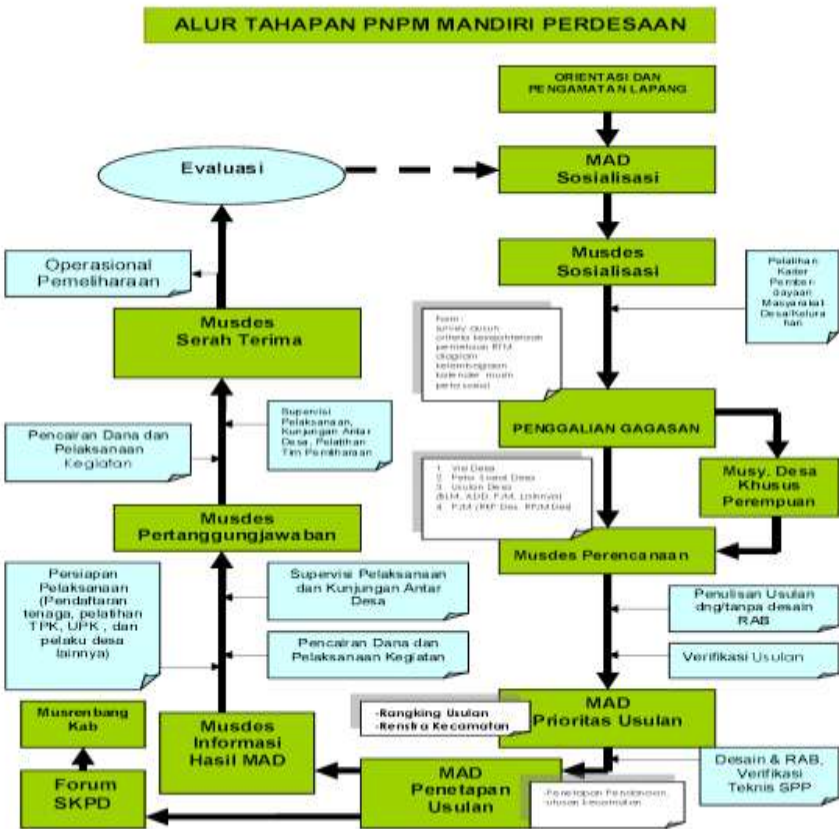
Sumber: PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Dolok Merawan

Kegiatan yang dilakukan dalam PNPM Mandiri Perdesaan bertujuan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui pengelolaan dana bergulir yang merupakan salah satu kegiatan yang memberikan kemudahan bagi rumah tangga miskin untuk mendapatkan permodalan yang dalam hal ini berbentuk simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP).

Pelaksanaan kegiatan SPP di Kecamatan Dolok Merawan dilaksanakan dalam satu periode yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaannya, program SPP dilaksanakan dengan melalui beberapa tahapan yaitu tahapan MAD sosialisasi, Musdes sosialisasi, Musyawarah Khusus Perempuan (MKP), pengajuan proposal, tahapan verifikasi, MAD prioritas usulan, MAD penetapan usulan,

serta tahapan pencairan dan pengembalian dana pinjaman. Alur kegiatan PNPM Mandiri dapat dilihat pada Gambar berikut ini.

Gambar 2.3. Alur Tahapan PNPM Mandiri Perdesaan



Sumber: PTO PNPM Mandiri Perdesaan, 2009

Secara umum tujuan dari Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (kelompok SPP) adalah untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudian akses pedanaan pada usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pedanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.

Kegiatan ini berupa penyaluran dana bergulir yaitu seluruh dana program bersifat pinjaman dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat yang disalurkan

melalui kelompok-kelompok masyarakat. Kegiatan pengelolaan dana bergulir kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan ini bertujuan untuk:

- Memberikan kemudahan akses permodalan usaha kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha.
- Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuan program.
- Peningkatan kapasitas pengelolaan kegiatan dana bergulir di tingkat wilayah perdesaan.
- Menyiapkan kelembagaan UPK dan lembaga pendukung lainnya sebagai pengelola dana bergulir yang mengacu pada tujuan program secara akuntabel, transparan dan berkelanjutan.
- Peningkatan pelayanan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat.

Secara khusus tujuan dari Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (kelompok SPP) adalah untuk:

- Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.
- Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal.
- Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif.
- Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat.
- Melembagakan pengelolaan dana bergulir.
- Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa.
- Mengembangkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.

Secara khusus kegiatan dari Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (kelompok SPP) bertujuan untuk:

- Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar.
- Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha.
- Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.

Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (kelompok SPP) memberikan beberapa aspek dasar dalam pelaksanaannya, diantaranya:

- *Kemudahan*, artinya masyarakat miskin dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan.
- *Terlembagakan*, artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman.
- *Keberdayaan*, artinya proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang profesional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan.
- *Pengembangan*, artinya setiap keputusan pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan, sehingga meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat perdesaan.
- *Akuntabilitas*, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dana yang digunakan dalam kegiatan kelompok SPP merupakan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yaitu dana yang disediakan untuk mendanai kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) per kecamatan maksimal 25% dari alokasi BLM. Dalam pelaksanaannya yang menjadi sasaran dan bentuk kegiatan yang dilakukan mencakup rumah tangga miskin yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada di masyarakat.

Bentuk kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman.

Uang yang dikembalikan oleh kelompok SPP tersebut akan di kelola oleh pengurus UPK untuk digulirkan kembali kepada kelompok-kelompok lain yang telah mengajukan proposal. Dana yang digunakan dalam program SPP adalah dana yang diperoleh dari dana BLM yaitu sebesar 25% dari total BLM yang diperoleh. Adapun penyaluran SPP ini dilakukan 1 (satu) kali dalam satu periode anggaran.

Kelompok SPP ini juga memiliki ketentuan dalam pelaksanaan kegiatannya yang meliputi:

- Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan yang satu sama lain saling mengenal, memiliki kegiatan tertentu dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang-kurangnya satu tahun.
- Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati.
- Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota.
- Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik.
- Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.

Pemberian dana bergulir bagi kelompok SPP melalui tahapan verifikasi kelompok SPP mencakup beberapa hal sebagai berikut :

- Pengalaman kegiatan simpan pinjam.
- Persyaratan kelompok.
- Kondisi kegiatan simpan pinjam, dengan penilaian:
 - Permodalan
 - Kualitas pinjaman
 - Administrasi dan pengelolaan
 - Pendapatan
 - Likuiditas (pendanaan jangka pendek)
- Penilaian khusus rencana kegiatan
- Jumlah Rumah Tangga Miskin sebagai contoh pemanfaat diverifikasi dengan daftar Rumah Tangga Miskin.
- Penilaian kategorisasi kelompok
- Pembuatan Berita Acara (BA) hasil verifikasi, dalam Berita Acara tersebut mencantumkan rekomendasi-rekomendasi termasuk jumlah usulan kelompok apakah sudah dalam kewajiban, keterlibatan Rumah Tangga Miskin sebagai pemanfaat, dan dikategorisasi perkembangan kelompok.

Usulan kegiatan kelompok SPP yang belum terdani oleh BLM tetapi telah dianggap layak dapat didanai dengan dana bergulir. Jika dana bergulir tidak mencukupi maka kelompok layak dapat ditetapkan sebagai kelompok tunggu yang dilaporkan dalam daftar tunggu kelompok. Daftar tunggu ini ditetapkan dengan Berita Acara.

Selain menetapkan daftar tunggu juga menetapkan mekanisme dan persyaratan dalam pendanaan kelompok termasuk daftar tunggu.

Pelestarian kegiatan SPP mengacu pada ketentuan pengelolaan dana bergulir dengan mempertimbangkan ketentuan akses BLM yang telah disepakati dalam MAD yang mencakup:

- Adanya dana kegiatan SPP yang produktif dan bertambah jumlahnya untuk penyediaan kebutuhan pendanaan masyarakat miskin.
- Adanya pelestarian prinsip PNPM Mandiri Perdesaan terutama keberpihakan kepada orang miskin dan transparansi.
- Penguatan kelembagaan baik dalam aspek permodalan ataupun kelembagaan kelompok.
- Pengembangan layanan kepada masyarakat.
- Pengembangan permodalan

Jumlah kelompok SPP yang berjalan dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang ada di Kecamatan Dolok Merawan mengalami pasang surut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 2.4. Jumlah Kelompok SPP Tahun 2009-2014

Sumber: PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Dolok Merawan

Pada tahun 2014, jumlah kelompok SPP di Kecamatan Dolok Merawan sebanyak 22 kelompok. Jumlah kelompok yang ada sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2104 juga mengalami fluktuasi. Dari awal mula kegiatan kelompok SPP ini di tahun 2010, terdapat sebanyak 14 kelompok SPP yang berjalan, dan pada tahun 2014 telah bertambah lagi menjadi 22 kelompok SPP.



BAB III

PERAN MODAL SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK SPP

Kegiatan kelompok SPP di Kecamatan Dolok Merawan, dilandasi pada beberapa pokok nilai dasar yang mendukung modal sosial, khususnya berkaitan dengan kepercayaan, norma, dan jaringan sosial.

Peran kepercayaan (*trust*) dan norma digunakan dalam dinamika kelompok, yaitu berkaitan dengan proses awal terbentuknya kelompok sampai dengan evaluasi kelompok itu sendiri. Selanjutnya peran jaringan sosial (*network*) ditujukan sebagai landasan untuk menjalin hubungan antara kelompok yang ada dengan lingkungan di sekitarnya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka dalam pembahasan ini akan dijabarkan aspek-aspek tersebut, dimana nilai-nilai yang ada dalam modal sosial tersebut digunakan dalam masyarakat sebagai alat untuk pemberdayaan kelompok SPP.

• Peran Kepercayaan (*Trust*) dan Norma dalam Dinamika Kelompok

Salah satu langkah penanggulangan kemiskinan adalah menciptakan kebijakan yang bersifat melindungi atau memberikan kemudahan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap sumber-sumber ekonomi termasuk modal. Untuk itu langkah yang penting yang diambil adalah dengan memberikan modal bagi pembiayaan usaha yang terjangkau oleh masyarakat miskin.

Secara holistik pembedakan kelompok dalam kegiatan PNM Mandiri Pedesaan berupa terbentuknya kelompok-kelompok SPP. Terbentuknya kelompok-kelompok perempuan ini merupakan proses intermediasi sosial dalam pembentukan modal sosial. Proses intermediasi sosial ini merupakan sebuah investasi yang dilakukan untuk pengembangan sumberdaya manusia dan kapasitas kelembagaan yang membuat kelompok-kelompok masyarakat miskin yang termarginalkan mempunyai kepercayaan diri untuk berpartisipasi dalam lembaga intermediasi keuangan formal.

Pembentukan kelompok merupakan awal dari kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan dalam hal ini adalah kegiatan kelompok SPP. Jika kegiatan SPP ini digunakan sebagai alat untuk menolong

orang miskin, proses tersebut harus diawali dengan pembentukan dan pengembangan kelompok. Hal ini amat penting karena secara individu lebih sulit bagi orang miskin untuk melepaskan dirinya dari kemiskinan bila dibandingkan secara komunal.

Orang miskin bisa lepas dari kemiskinan apabila mereka bekerja sama dengan orang miskin yang lain. Sebagai konsekuensinya, kegiatan SPP harus mendorong pembantuan dan pengembangan kelompok. Kelompok masyarakat yang terbentuk akan sangat efektif bila mempunyai orientasi peningkatan pendapatan anggotanya, bersifat terbuka, memiliki prinsip demokratis dan transparansi.

Berbagai tindakan kolektif yang didasari atas saling mempercayai yang tinggi akan meningkatkan partisipasi masyarakat terutama dalam hal membangun kemajuan bersama. Masyarakat yang kurang memiliki perasaan saling mempercayai akan sulit menghindari berbagai situasi kerawaan sosial dan ekonomi yang mengancam. Semangat kolektifitas akan segera tenggelam dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga akan hilang.

Salah satu model yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat miskin adalah dengan pendekatan kelompok. Kelompok dibentuk untuk mempermudah anggota-anggotanya untuk mencapai apa yang dibutuhkan atau yang diinginkan. Dengan kesadaran yang demikian maka setiap anggota kelompok akan benar-benar menjalankan fungsinya dengan memanfaatkan potensi yang ada baik pada anggota itu sendiri maupun lingkungannya untuk mencapai tujuan kelompok.

Pendekatan kelompok yang dilakukan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin dalam PNPM Mandiri Perdesaan adalah suatu pengharapan dimana dengan telah dibentuknya kelompok-kelompok di masyarakat program pengentasan kemiskinan akan lebih terencana, serta pelaksanaan dan evaluasi program yang ada akan dilakukan secara mandiri oleh anggota-anggota dari kelompok tersebut.

Pembentukan kelompok SPP dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dimaksudkan sebagai sarana untuk penyaluran pemberian pinjaman modal kepada perempuan. Kegiatan ini dimaksudkan agar modal yang diberikan kepada kelompok tersebut dapat dijadikan sebagai tambahan bagi modal usaha kecil yang telah berjalan selama ini yang dijalankan oleh perempuan sebagai kegiatan usaha untuk menambah sekaligus menopang ekonomi keluarga.

Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) adalah salah satu Program PNPM Mandiri Perdesaan yang merupakan usulan dari Musyawarah Khusus Perempuan (MKP). Pada saat ini usulan kelompok SPP juga sudah menjadi prasyarat yang harus ada dalam pembuatan RPJM Desa. Bantuan modal ini ditujukan bagi kelompok SPP yang mempunyai usaha.

Usulan kegiatan SPP dimulai dari usulan desa ke kecamatan, kemudian dilanjutkan ke kabupaten, selanjutnya sampai ke Propinsi. Sasaran kegiatan SPP ini dimaksudkan agar pinjaman yang berasal dari program PNPM Mandiri Perdesaan ini dapat membantu warga masyarakat khususnya kelompok perempuan agar modal usahanya dapat sedikit bertambah dan usaha yang telah berjalan akan semakin maju, yang pada akhirnya akan memperbaiki ekonomi rumah tangga secara signifikan.

PNPM Mandiri Perdesaan telah membuka prioritas dalam hal pemberdayaan perempuan dengan memberikan prioritas utama pada keterlibatan dan peran perempuan di dalamnya. Perempuan dimungkinkan untuk terlibat secara langsung dalam pembentukan kelompok, pengambilan keputusan, dan penguatan ekonomi yang terhimpun dalam program SPP.

Proses yang dilakukan dalam kegiatan pembentukan kelompok perempuan dilakukan dengan beberapa tahapan yang kemudian dapat dikategorikan menjadi 3 kegiatan penting dalam kelompok yaitu: proses pembentukan kelompok, penguatan kelompok dan kemandirian kelompok.

Kelompok didefinisikan oleh Robert K. Merton sebagai '*a number of people who interact with one another in accord with established pattern*' [sekelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang telah mapan] (Soenarto, 2004:130). Lebih lanjut dijelaskan bahwa terdapat 3 kriteria objektif bagi sebuah kelompok. Pertama, kelompok ditandai oleh sering terjadinya interaksi. Kedua, pihak yang berinteraksi mendefinisikan diri mereka sebagai anggota. Ketiga, pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok.

Terbentuknya kelompok disebabkan oleh adanya dua orang atau lebih yang memiliki kontak untuk mencapai tujuan. Kelompok memiliki tujuan yang hendak dicapai. Pembentukan kelompok dalam kegiatan SPP, proses awal pembentukan atau penumbuhan kelompok sudah dimulai pada saat Musyawarah Dusun dalam pengajuan kelompok-kelompok SPP. Pada kondisi ini telah

terhimpun beberapa nama kelompok SPP yang diajukan sebagai calon penerima dana program SPP.

Sejatinya, sebelum diajukan dalam forum musyawarah tingkat dusun dan seterusnya sampai yang tertinggi, maka sebenarnya telah terbentuk beberapa kelompok SPP di masyarakat itu sendiri. Kelompok-kelompok inilah yang kemudian akan diajukan sebagai kelompok calon penerima bantuan dana bergulir pada program SPP. Kelompok-kelompok yang telah ada inilah yang kemudian menjadi kelompok sasaran sebagai penerima bantuan SPP, baik untuk mengembangkan usaha yang telah ada maupun sebagai modal untuk usaha yang baru dirintis.

Manusia sebagai makhluk sosial pasti akan membutuhkan dan melakukan interaksi dengan orang lain di sekitarnya, sehingga antar individu akan terjalin hubungan dalam tatanan sosial bermasyarakat. Interaksi sosial antar individu dalam masyarakat tersebut bisa terjadi karena tersedianya elemen utama pembentuk modal sosial yaitu sikap saling percaya (*trust*) dan toleransi (*tolerance*) yang melekat di antara mereka.

Peran modal sosial, terutama kepercayaan (*trust*), dimulai saat pembentukan awal kelompok, dimana dilakukan seleksi terhadap anggota kelompok SPP itu sendiri. Sebagai langkah awal dilakukan verifikasi dilingkup kelompok kecil itu sendiri. Umumnya pembentukan kelompok-kelompok di masyarakat ini, dimulai dari kelompok-kelompok tradisional yang telah ada di masyarakat itu, misalnya: kelompok pengajian, perwiritan, Serikat Tolong Menolong (STM), kumpulan marga, dan sebagainya. Seperti penuturan informan penelitian:

"Kelompok SPP yang ada sekarang ini berasal dari perwiritan ibu-ibu. Karena jumlah kami banyak, sampai 35 orang maka tidak semua anggota masuk dalam kelompok SPP. Pada walnya hanya berjumlah 5 orang saja. Tapi sekarang karena ada aturan baru yang mengharuskan satu kelompok terdiri dari 10 orang, maka kami masukkan anggota lainnya dalam kelompok SPP."

Dari kelompok-kelompok inilah kemudian dibentuk kelompok-kelompok dengan anggota yang relatif sudah lama namun menggunakan nama yang baru. Selanjutnya, kelompok ini diajukan sebagai kelompok calon penerima bantuan modal bagi kelompok perempuan dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

Kelompok merupakan tempat di mana anggota-anggotanya saling berhubungan untuk bersama-sama mencapai tujuan kelompok. Berbagai jumlah kelompok yang diikuti oleh responden

dalam penelitian ini. Mulai dari 1 kelompok sampai dengan 4 kelompok. Dari kesemuanya, yang paling banyak dipilih oleh responden adalah sebanyak 2 kelompok atau organisasi yang diikuti oleh mereka. Kondisi jumlah organisasi yang diikuti oleh responden dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.1. Jumlah Organisasi yang Diikuti Responden

No	Jumlah Organisasi	Jumlah (orang)	Persentase
1	1 Organisasi	2	1,00
2	2 Organisasi	158	76,70
3	3 Organisasi	42	20,40
4	4 Organisasi	4	1,90
Jumlah		206	100,00

Sumber: Data Kuesioner

Penjelasan mengenai 1 kelompok atau organisasi yang diikuti oleh responden dipilih oleh sebanyak 2 orang atau 1,00 % responden. Responden yang memilih 1 kelompok beralasan bahwa hanya kelompok SPP ini saja yang mereka ikuti. Mereka adalah responden yang belum berumah tangga, sehingga untuk mereka yang beragama Islam kegiatan seperti perwiritan atau pengajian belum mereka ikuti secara rutin. Kegiatan tersebut hanya sesekali diikuti mereka, dimana peran mereka hanya menggantikan orang tua yang biasa mengikuti kegiatan tersebut yang tidak bisa hadir karena suatu hal.

Responden yang memilih 2 kelompok atau organisasi sebanyak 158 orang atau 76,70% dari jumlah responden. Responden yang memilih jawaban ini beralasan bahwa selain kelompok SPP, ibu-ibu yang ada di kecamatan ini telah lama terlibat dalam kelompok perwiritan atau pengajian yang ada di lingkungannya masing-masing. Begitupun beberapa kelompok yang beragama Kristen, mereka aktif di kelompok gereja mereka. Sehingga dari sinilah sebenarnya kemudian yang menjadi cikal bakal kelompok-kelompok yang diajukan sebagai kelompok penerima modal dana dalam kegiatan kelompok SPP PNPM Mandiri Perdesaan.

Responden yang memilih 3 kelompok atau organisasi sebanyak 42 orang atau 20,40% jumlah responden. Selain kedua alasan yang telah disebutkan di atas responden juga terlibat dalam

kegiatan kelompok arisan atau ikut dalam organisasi kelompok warga. Kegiatan arisan yang berkembang di masyarakat dapat menumbuhkan nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas dalam satu komunitas bersama. Kebersamaan yang tumbuh didasari atas nilai saling percaya dalam mengelola, menjalankan kegiatan arisan bersama. Kegiatan ini dapat pula mengatasi berbagai tuntutan ekonomi keluarga di kalangan anggotanya. Untuk itulah komunitas arisan tumbuh dan berkembang sangat pesat sesuai dengan tuntutan kebutuhan warga.

Terakhir, responden yang memilih 4 kelompok atau organisasi sebanyak 4 orang atau 4,90% jumlah responden. Alasan responden adalah selain ketiga hal yang telah dijelaskan di atas, mereka juga terlibat dalam kegiatan kelompok yang ada dalam kelompok profesi dimana mereka bekerja (misalnya sebagai karyawan perkebun).

Kelompok yang terbentuk di masyarakat dimaksudkan untuk mensejahterakan dan memberikan keuntungan bagi anggotanya. Hal ini juga akan turut memberikan kontribusi terhadap perkembangan masyarakat tersebut. Keaktifan masyarakat yang terlibat dalam kelompok yang ada akan memberikan dampak yang lebih positif baik bagi masyarakat tersebut maupun bagi masyarakat yang di luar lingkungan komunitasnya. Kondisi ini mensiratkan bahwa semakin banyak kelompok yang dimasuki artinya semakin banyak hubungan dan relasi yang terjadi. Umumnya kelompok-kelompok tersebut memiliki karakteristik dan tujuan tersendiri dari apa yang ingin dicapai.

Selain jumlah kelompok atau organisasi, juga telah dijelaskan jenis organisasi yang dianggap penting oleh responden untuk mereka ikuti. Kondisi yang berkaitan dengan kelompok atau organisasi yang paling penting bagi rumah tangga responden dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.2. Organisasi yang Paling Penting Bagi Rumah Tangga

No	Organisasi	Jumlah (orang)	Persentase
1	Marga	16	7,80
2	Perwiritan	167	81,10
3	SPP	2	1,00
4	STM	21	10,20
Jumlah		206	100,00

Sumber: Data Kuesioner

Tabel diatas dapat memberikan penjelasan mengenai organisasi yang paling penting bagi responden. Pada umumnya, responden memilih keterlibatan mereka dalam kelompok keagamaan seperti halnya kelompok perwiritan yaitu sebanyak 167 orang atau 81,10% responden. Perwiritan atau pengajian ibu-ibu ini merupakan kegiatan yang jamak dijumpai di daerah ini.

Selain itu, sebanyak 21 orang atau 10,20% responden memilih kelompok STM merupakan kelompok yang terpenting dalam rumah tangganya. Alasan memilih kelompok STM ini adalah beberapa anggota kelompok SPP merupakan wanita dengan status janda. Jika pada umumnya ada suami, maka suamilah yang menjadi anggota STM, namun jika sudah menjadi janda, maka perempuan (istri) yang menggantikan suami menjadi anggota kelompok Serikat Tolong Menolong (STM).

Sebanyak 16 orang atau 7,80% jumlah responden memilih kelompok marga atau perkumpulan etnis tertentu sebagai kelompok yang dianggap penting. Sisanya sebanyak 2 orang atau 1,00% responden yang mengatakan bahwa kelompok SPP sebagai kelompok yang dianggap penting.

Keterlibatan responden dalam keanggotaan suatu kelompok memiliki beragam alasan. Dari tiga alasan kesamaan mengapa perempuan memilih untuk ikut dalam suatu kelompok, ternyata yang paling diminati adalah berdasarkan kesamaan jenis kelamin, kemudian kesamaan agama, dan terakhir berdasarkan kesamaan suku atau bahasa. Seperti yang dikemukakan oleh informan penelitian:

"Kelompok SPP yang terbentuk anggotanya terdiri dari perempuan. Ada suka dan dukanya dalam kelompok. Sukanya, karena terdiri dari perempuan, kami tahu apa yang akan kami lakukan. Satu dengan yang lainnya saling mendukung. Dukanya, namanya perempuan, terkadang muncul sifat iri hati. Namun semua itu kalau dalam kelompok harus bisa di kecilkan. Sehingga kelompok kami masih bisa bertahan sampai sekarang, dan terus berkembang jumlah pinjamannya."

Keterlibatan dalam suatu kelompok berdasarkan atas kesamaan jenis kelamin dinyatakan sebanyak 195 orang (94,70%), kemudian berdasarkan agama sebanyak 169 orang (82,00%) dan pemilihan berdasarkan suku atau bahasa sebanyak 47 orang atau (22,80%). Pemilihan anggota kelompok berdasarkan jenis kelamin, dikarenakan responden penelitian berasal dari kelompok SPP, maka jenis kelamin inilah yang menjadi jawaban mayoritas, disusul kemudian pemilihan keanggotaan kelompok berdasarkan atas kesamaan agama, dan suku atau bahasa. Kondisi pemilihan keanggotaan kelompok berdasarkan kesamaan yang dimiliki dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.3. Jenis Kesamaan dalam Pemilihan Kelompok

No	Kesamaan	Jumlah			
		Ya		Tidak	
		<i>f</i>	%	<i>f</i>	%
1	Agama	169	82,00	37	18,00
2	Jenis Kelamin	195	94,70	11	5,30
3	Suku atau Bahasa	47	22,80	159	77,20

Sumber: Data Kuesioner

Kenyataan ini, tentunya berbanding terbalik jika dibandingkan dengan pertanyaan yang sama namun kategorinya diganti menjadi atas kesamaan pekerjaan dan kesamaan latar belakang atau tingkat pendidikan. Umumnya responden menjawab pilihan "tidak" pada kategori ini. Dari sini dapat kita artikan bahwa pemilihan terhadap keanggotaan suatu kelompok tidak didasari pada pilihan kesamaan pekerjaan atau kesamaan latar belakang dan

pendidikan. Untuk lebih jelasnya kondisi ini dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.4. Jenis Kesamaan Anggota-Anggota dalam Kelompok

No	Kesamaan	Jumlah			
		Ya		Tidak	
		<i>f</i>	%	<i>f</i>	%
1	Pekerjaan	61	29,60	145	70,40
2	Latar Belakang atau Tingkat Pendidikan	69	33,50	137	66,50

Sumber: Data Kuesioner

Kelompok yang ada dalam masyarakat tidak sekedar prasyarat bagi penerima bantuan dana untuk modal dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, di sisi lain pembentukan kelompok di masyarakat dimaksudkan sebagai sarana bagi masyarakat untuk bisa mendiskusikan persoalan yang mereka hadapi, mencari peluang yang mungkin bisa mereka manfaatkan untuk perbaikan kondisi sosial ekonomi mereka, dan mencari solusi terbaik yang dapat mereka lakukan dalam menghadapi kesulitan hidup.

Kondisi ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Coleman, dimana modal sosial merupakan suatu cara untuk menjelaskan bagaimana orang berusaha untuk bekerjasama. Modal sosial merupakan suatu sarana untuk pemecahan atas masalah, mengapa manusia memilih untuk bekerjasama, bahkan ketika kepentingan utama mereka terkesan dapat dipenuhi melalui kompetisi (Field, 2005:35).

Pemilihan orang-orang yang dapat diajak bekerjasama dimulai dengan seleksi internal dalam kelompok. Kegiatan ini biasanya telah dimulai dengan memberikan perhatian khusus kepada orang-orang yang memiliki rekam jejak yang baik dalam masyarakat itu sendiri. Setiap anggota menginginkan rasa nyaman dalam kelompok yang mereka bentuk. Dalam kelompok yang terbentuknya nantinya akan terjadi interaksi yang tentunya setiap anggota di dalamnya akan merasa diterima, dapat berbaur dengan yang lainnya, serta mampu untuk bekerjasama dalam kelompok. Sehingga diperlukan rasa saling percaya antara anggota yang satu dengan yang

lainnya yang pada akhirnya akan mampu menciptakan kohesi sosial dalam kelompok tersebut.

Kohesi sosial yang tinggi dalam kelompok akan mampu menghindari kelompok dari perpecahan, begitupun sebaliknya kohesi sosial yang rendah akan mempermudah keretakan dan perpecahan dalam kelompok tersebut. Untuk meningkatkan kohesivitas kelompok diperlukan norma-norma dan nilai-nilai dalam bertindak, yang digunakan sebagai elemen pembentuk modal sosial yang mengarah kepada kebutuhan untuk menguatkan modal sosial tersebut agar memiliki kekhususan dan tidak ada tekanan di dalamnya.

Ikatan solidaritas dalam kelompok dijelaskan Putnam (1995) sebagai kemampuan warga secara kolektif dalam mengalihkan kepentingan individu menjadi kepentingan bersama akan membangun kekompakan dan solidaritas dalam masyarakat. Solidaritas dalam masyarakat dapat menyatukan sebuah persepsi tentang hal yang ingin diperjuangkan. Berangkat dari hal tersebut masyarakat dapat menyatukan diri bersama, dengan asumsi bahwa kekuatan pikiran dan ide-ide bersama akan lebih bermanfaat dan mempunyai tekanan yang lebih efektif daripada secara individual.

Sistem kegiatan dalam kelompok SPP berupa pinjaman modal pada kelompok, berupaya untuk mendidik masyarakat yang semula usahanya masih tradisional, berperilaku konsumtif, serta perilaku menunggu dana bantuan hibah dari pemerintah yang seringkali tidak sesuai dengan harapan, berubah menjadi masyarakat yang berpikir tentang hubungan kekeluargaan dengan kelompoknya, memiliki saling tenggang rasa dan belajar manajemen yang lebih baik walau masih sederhana. Hubungan dalam kelompok ditanamkan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam hubungan bermasyarakat sehingga tercipta masyarakat yang berdaya, mandiri dan madani.

Tujuan terbentuknya kelompok itu sendiri adalah untuk mencapai maksud yang diinginkan oleh kelompok di masa mendatang. Sehingga diperlukan peran serta anggota kelompok tersebut untuk dapat menjalankan tugas yang ada dalam kelompok tersebut. Fukuyama (2000) dalam menggunakan konsep kepercayaan untuk mengukur tingkat modal sosial melihat bahwa kondisi kesejahteraan dan demokrasi serta daya saing suatu masyarakat ditentukan oleh tingkat modal sosial yang akan menjadi semakin kuat apabila dalam satu masyarakat terjalin rasa percaya

melalui suatu ikatan jaringan hubungan baik antar masyarakat itu sendiri maupun kelembagaan sosial.

Kepercayaan merupakan hal yang dibutuhkan untuk menjalani hubungan sosial. Tanpa adanya kepercayaan antar masyarakat mustahil hubungan sosial yang harmonis akan tercipta. Individu atau kelompok jika memiliki rasa saling percaya yang rendah atau mengalami krisis kepercayaan terhadap individu atau kelompok lain, maka yang akan timbul adalah rasa saling curiga yang berlebihan yang pada akhirnya akan menciptakan berbagai macam masalah-masalah sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan rasa saling percaya antar masyarakat dalam menjalani hubungan sosial agar tidak terjadi masalah-masalah sosial tersebut.

Rasa percaya merupakan bentuk ekspresi dari hati yang mampu mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosial yang didasari perasaan yaitu bahwa manusia lain akan melakukan seperti yang diharapkan dan akan selalu bertindak dalam suatu pola yang saling mendukung.

Rasa percaya menjadi pilar kekuatan dalam modal sosial. Seseorang akan mau melakukan apa saja untuk manusia lain kalau ia yakin bahwa manusia tersebut akan membawanya ke arah yang lebih baik atau yang diharapkan. Rasa percaya dapat membuat manusia bertindak sebagaimana yang di arahkan oleh orang lain karena yang bersangkutan meyakini bahwa tindakan yang di arahkan tersebut diyakini merupakan bentuk pembuktian dari kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Rasa percaya tidak muncul secara tiba-tiba. Keyakinan pada seseorang atau sekelompok manusia muncul dari kondisi terus menerus yang berlangsung secara alamiah ataupun situasi yang dikondisikan. Rasa percaya bisa diwariskan tetapi harus dipelihara dan dikembangkan karena rasa percaya bukan merupakan sesuatu yang absolut.

Tingkat kepercayaan masyarakat pada seseorang biasanya dapat diukur pada kegiatan seseorang tersebut, yang pada umumnya tidak membawa keresahan di tengah-tengah masyarakat. Misalnya orang yang tidak pernah berbuat keonaran (masalah), tidak pernah mempunyai kebiasaan menipu masyarakat, dan juga dapat dilihat dari keturunan (latar belakang keluarga) mereka.

Pembentukan kelompok SPP, tentunya juga diikuti dengan pembentukan struktur pengurus dalam kelompok itu sendiri. Slamet (2006), menyatakan kalau dalam suatu kelompok memiliki perilaku yang dipengaruhi oleh 9 faktor, akan menghasilkan suatu kelompok

yang dinamis. Ke-9 faktor tersebut adalah: (1) Tujuan kelompok; (2) Struktur kelompok; (3) Fungsi tugas; (4) Pembagian dan pembinaan kelompok; (5) Kekompakan kelompok; (6) Suasana kelompok; (7) Ketegangan kelompok; (8) Keefektifan kelompok, dan; (9) Maksud tersembunyi.

Salah satu faktor yang dikemukakan Slamet tersebut adalah terbentuknya struktur kelompok. Struktur kelompok dalam hal ini pada kelompok SPP, merupakan pengurus kelompok yang terdiri dari struktur yang sederhana, yaitu adanya posisi Ketua, Sekretaris dan Bendahara, serta para anggota. Dalam menentukan siapa yang akan menduduki struktur pimpinan yaitu ketua, sekretaris dan bendahara, di musyawarahkan bersama dengan seluruh anggota yang ada dalam kelompok SPP.

Umumnya, posisi pimpinan ini diduduki oleh anggota kelompok yang dianggap memiliki kemampuan lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Faktor pendidikan tidak menjadi patokan seseorang bisa menjadi pimpinan. Misalnya pimpinan di salah satu kelompok SPP, beliau sudah berusia lanjut dan tidak memiliki pendidikan tinggi (pendidikannya tidak tamat SD). Namun bagi anggota kelompok lainnya ia dianggap mampu untuk memimpin dan menyampaikan informasi yang didapat kepada seluruh anggotanya. Padahal anggota kelompok lainnya banyak yang berusia lebih muda dari dirinya dan lebih cekatan untuk mobilisasi dari satu kegiatan kekegiatan lainnya di kelompok. Seperti yang dikutip dari wawancara dengan informan penelitian:

“Masih banyak anggota lainnya yang usianya jauh lebih muda dari saya. Tapi, jangankan untuk berbicara di depan umum, untuk mengantarkan uang setoran kelompok saja ke kantor camat mereka tidak berani. Mereka takut kalau disuruh berbicara nanti bisa bersalahan dan membuat malu. Padahal mereka itu memiliki pendidikan. Ada yang SMP dan ada juga yang sampai SMA.”

Pengalaman lainnya, berkaitan dengan pemilihan pimpinan yang ada dalam kelompok, tidak jarang posisi bendahara sering diisi oleh anggota kelompok yang dianggap memiliki kemampuan ekonomi yang lebih dibandingkan anggota lainnya. Hal ini dimaksudkan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam kelompok, misalnya ada anggota kelompok yang tidak mampu membayar iuran kelompok, maka diharapkan bendahara mampu untuk menutupi iuran tersebut dengan dana pribadinya. Seperti yang dikemukakan oleh informan penelitian:

“Kami memilih ibu itu sebagai bendahara, selain orangnya dapat dipercaya, ia juga secara ekonomi lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi kalau terjadi sesuatu dengan anggota, misalnya tidak mampu membayar iuran bulanan maka ibu itu bisa membayar iuran dengan uangnya terlebih dahulu.”

Perlunya ditanamkan kepercayaan dalam pembentukan sekaligus pengembangan kelompok nantinya, dikarenakan selain pemberian pinjaman kepada kelompok SPP ini dilakukan secara komersial dalam arti bahwa ada kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut dengan bunga yang kecil, juga sangat diperlukan adanya motivasi untuk bekerja keras dan bersifat jujur. Pinjaman yang diberikan kepada kelompok dimaksudkan untuk mampu menciptakan usaha produktif yang dapat menghasilkan pekerjaan yang mandiri dan mampu menghasilkan pendapatan. Pinjaman yang diberikan dianggap mampu membantu lapisan masyarakat miskin dengan berbagai persyaratan yang terjangkau dan sesuai dengan kondisi masyarakat.

Dengan terbantunya usaha kecil yang ada dalam anggota kelompok, maka kewajiban membayar pinjaman juga diharapkan akan lancar. Kelancaran membayar iuran tidak saja berguna bagi anggota kelompok lainnya sebab akan mempermudah bagi kelompok untuk mengajukan pinjaman selanjutnya tanpa harus diverifikasi lagi. Keuntungan lainnya adalah simpanan dalam kelompok juga akan semakin meningkat yang nantinya dapat digunakan anggota lainnya untuk pinjaman modal usaha tanpa harus membentuk kelompok baru sebagai prasyarat pinjaman dalam kegiatan SPP (pinjaman internal kelompok).

Memang pinjaman dari internal dalam kelompok juga tidak bisa diberikan kepada sembarangan orang. Hal ini juga terlihat dalam keterkaitan antara kelompok dengan kepercayaan (*trust*, bahwa dalam tindakan yang dilakukan jika dilakukan secara perorangan mungkin akan diragukan tindakannya tersebut. Jika seseorang masuk sebagai anggota suatu kelompok maka ia akan lebih dipercaya sebab dengan adanya kelompok maka anggota kelompok tersebut akan mendapatkan tekanan halus untuk bertindak sesuai dengan tujuan dari pemberi pinjaman dalam hal ini adalah PNPM Mandiri Perdesaan.

Kepercayaan merupakan salah satu faktor pembentuk modal sosial. Kepercayaan sangat erat kaitannya dengan budaya, budaya berkaitan dengan etika dan moral yang berlaku. Kepercayaan akan muncul apabila masyarakat dan lembaga bersama-sama memiliki

seperangkat nilai-nilai tanggung jawab moral, kewajiban terhadap masyarakat dan kepercayaan yang lebih didasarkan pada kebiasaan dan keseharian daripada sekedar perhitungan rasional semata. Modal sosial dapat menjadi lebih baik jika nilai-nilai moral memadai untuk menumbuhkan kejujuran yang didasari atas nilai tanggung jawab.

Kegiatan kelompok SPP ini ada dikenal istilah tanggung renteng. Artinya, jika salah satu anggota tidak mampu melaksanakan kewajibannya maka seluruh anggota akan mempertanggungjawabkannya. Sistem Tanggung Renteng dipakai sebagai jaminan sosial yang tercipta berdasarkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, yaitu: kebersamaan, tolong-menolong dan kepercayaan antar anggota masyarakat. Inilah sistem bergotong-royong dan kebersamaan, agar kalau ada kesulitan, kelompoknya akan bekerjasama untuk meringankan kesulitan anggotanya. Semua anggota yang ada di setiap kelompok harus bertanggung jawab kepada anggotanya masing-masing.

Tidak hanya sebatas di dalam kelompok saja, jika terjadi penunggakan dalam kelompok atau kelompok sama sekali tidak mampu mengembalikan pinjamannya maka pihak desa juga terkena imbasnya. Sanksi yang diberikan kepada desa tempat kelompok yang bermasalah tersebut berada berupa tidak akan diberikan bantuan dana yang berasal dari dana PNPM Mandiri Perdesaan untuk tahun berikutnya.

Dengan demikian, maka setiap anggota kelompok SPP harus memahami dengan baik mengenai hak dan kewajiban setiap anggota kelompok, serta harus memahami ketentuan dan peraturan dalam kegiatan kelompok. Setiap anggota kelompok harus bisa memahami dan melaksanakan aturan kelompok tersebut dengan rasa tanggung jawab dan disiplin. Seperti halnya yang disampaikan informan penelitian:

“Kelompok SPP harus dibangun dengan rasa saling percaya dan niat baik. Banyak kelompok yang dibuat, awalnya sudah dengan niat yang tidak baik. Akhirnya kelompok tersebut tidak bisa mengembalikan pinjaman kelompok. Uang kelompok bukan digunakan untuk keperluan usaha, tapi digunakan untuk kredit motor. Akhirnya uang pengembalian untuk kelompok tidak bisa dipulangkan. Banyak juga kelompok yang berbuat begitu dulu. Tapi sekarang, seleksinya lebih ketat, apalagi dengan pergantian fasilitator PNPM kecamatan yang baru ini.”

Berkaitan dengan kepercayaan yang responden berikan, maka didapat hasil bahwa sebanyak (68,00%) menyatakan bahwa mereka tidak bisa begitu saja percaya dengan orang lain. Sisanya sebanyak (32,00%) menyatakan kalau mereka bisa percaya terhadap orang kebanyakan. Kondisi tingkat kepercayaan kepada orang lain ini dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.5. Tingkat Kepercayaan pada Orang Lain

No	Tingkat Kepercayaan	Jumlah (orang)	Persentase
1	Kebanyakan orang bisa dipercaya	66	32,00
2	Anda tidak bisa terlalu percaya	140	68,00
Jumlah		206	100,00

Sumber: Data Kuesioner

Cohen dan Prusak (2001) menyebutkan bahwa modal sosial adalah nilai dari hubungan yang aktif di antara masyarakat. Setiap pola hubungan yang terjadi tersebut diikat oleh kepercayaan (*trust*), saling pengertian (*mutual understanding*), dan nilai-nilai kebersamaan (*shared value*). Masyarakat dengan segala kekurangan yang ada, saling membutuhkan satu sama lain, terutama pada hal-hal yang tidak dapat mereka selesaikan sendiri. Semakin tinggi nilai kepercayaan di antara masyarakat di dalam suatu wilayah, maka semangat untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama akan semakin tinggi pula. Hal ini pada akhirnya akan membentuk modal sosial yang tinggi dalam masyarakat tersebut.

Tingkat kepercayaan yang dimiliki oleh responden terhadap orang lain masih terdapat keraguan. Hal ini dapat dilihat pada jawaban responden berkaitan dengan kepercayaan terhadap orang yang tinggal di desanya. Paling banyak responden menjawab agak setuju yaitu sebanyak 131 orang atau 63,60%. Sehingga orang akan terus waspada terhadap kemungkinan adanya pihak-pihak yang mencoba untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Hal ini dinyatakan oleh 93 orang atau 45,10% responden yang menjawab tentang kecurigaan mereka terhadap orang lain yang ingin selalu

mengambil kesempatan dari situasi yang terjadi. Kondisi ini dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.6. Kepercayaan pada Orang Lain

No	Kesamaan	Jumlah							
		SS		AS		TK		ATS	
		<i>f</i>	%	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%
1	Kebanyakan orang yang tinggal di desa ini dapat dipercaya.	37	18,00	131	63,60	9	4,40	29	14,10
2	Di Desa ini, orang harus selalu waspada atau ada orang yang sepertinya mengambil keuntungan dari Anda	47	22,80	93	45,10	5	2,40	61	29,60

Sumber: Data Kuesioner, 2014

Dari hasil tersebut terlihat kondisi dimana dapat dipahami alasan nilai unsur kepercayaan terhadap tetangga di daerah ini rendah. Kondisi ini menjelaskan tentang keberadaan hubungan sosial di daerah ini yang menyatakan tentang tidak yakin dapat mempercayai orang di desa ini, atau kewaspadaan pada orang lain yang dianggap selalu mengambil keuntungan dari diri orang lain. Seperti diungkapkan oleh informan penelitian:

“Agak susah sekarang percaya dengan orang lain, apalagi kita baru kenal. Seringkali orang baik pada awalnya, tapi kalau tujuannya sudah tercapai, kita ditinggalkan begitu saja. Orang seringkali mengambil kesempatan dari orang lain. Apalagi orang itu terlihat baik, seringkali ditokoh-tokohi yang lainnya. Makanya sekarang ini kita tidak boleh percaya sama orang lain begitu saja, harus tahu juga apa maunya dia dari kita. Biar tidak dimanfaatkannya kita untuk tujuannya.”

Kondisi ini menunjukkan bahwa kepercayaan tidak hanya disebabkan oleh jaringan yang dimiliki, tetapi juga ditentukan oleh nilai-nilai individual yang dipegang oleh seseorang. Norma dan kepercayaan tidak dengan serta merta muncul dikarekanya adanya interaksi yang ada selama ini dalam masyarakat khususnya kelompok SPP. Dibutuhkan nilai bersama (*shared value*) yang menjadi pilar bagi tumbuh dan berkembangnya norma dan kepercayaan dalam masyarakat.

Putnam (1993) menyatakan bahwa kelompok menanamkan kebiasaan kerjasama, solidaritas, dan semangat kebersamaan pada anggota-anggotanya. Dari kelompok kecil ini dapat merefleksikan pola yang sama pada kondisi makro di mana performa ekonomi akan mengalami performa yang positif jika didasari atas sikap kerjasama, solidaritas, dan semangat kebersamaan.

Modal sosial tidak dibangun oleh satu individu saja, akan tetapi terletak pada individu-individu yang tumbuh dalam satu kelompok untuk bersosialisasi sebagai bagian penting dari nilai-nilai yang melekat. Nilai-nilai yang ada dalam kehidupan sehari-hari dibuat menjadi aturan untuk ketertiban berkehidupan yang disebut dengan norma. Norma merupakan susunan dari pemahaman terhadap nilai-nilai kehidupan serta harapan yang diyakini dan dijalankan oleh sekelompok orang. Norma merupakan modal sosial yang muncul kerjasama dimasa lalu yang diterapkan untuk kehidupan bersama.

Aturan atau norma-norma yang ada dalam masyarakat berperan pengontrol bentuk-bentuk perilaku yang tumbuh dalam masyarakat. Aturan ini diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas tertentu. Bentuk norma yang tumbuh di masyarakat juga akan menentukan kuat lemahnya hubungan antar individu dan memberikan dampak bagi perkembangan masyarakat tersebut.

Norma sosial berlaku secara kolektif. Norma sosial dalam suatu masyarakat bisa saja sama dengan norma yang ada dalam masyarakat lain. Akan tetapi tidak semua bentuk perwujudan atau tindakan norma sosial bisa digeneralisir. Norma sosial mempunyai konsekuensi. Ketidaktaatan pada norma atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial yang ada dalam masyarakat menyebabkan seseorang dapat diberikan sanksi. Bentuk sanksi sosial terhadap pelanggar norma sosial dalam masyarakat dapat berupa pemberian tindakan atau hukuman, atau bisa berupa sanksi sosial yang lebih sering ditujukan dalam bentuk sikap seperti: penolakan

atau tidak melibatkan seseorang yang melanggar norma untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat.

• **Peran Jaringan Sosial (*Network*) dalam Kepedulian terhadap Lingkungan Sekitar**

Terbangunnya jaringan sosial di antara kelompok SPP yang ada dapat membentuk kelompok atau komunitas sosial dalam memperkuat modal sosial. Kuatnya ikatan sosial antar warga dalam satu komunitas dapat meningkatkan kapasitas individu-individu dalam memecahkan berbagai macam persoalan sehari-hari. Bangunan ikatan sosial dalam jaringan sosial bertumpu pada kedekatan lokasi, emosional dan sosial. Frekuensi interaksi sosial mendorong terbentuknya komunitas baru yang terlembagakan dalam jaringan sosial yang terbentuk secara alamiah, berbentuk komunitas atau kelompok sosial. Interaksi antar warga yang terlembagakan dalam komunitas ataupun kelompok merupakan cerminan kualitas jaringan sosial dengan meneguhkan norma-norma yang ada.

Dimensi jaringan sosial salah satunya dapat dilihat dari kesediaan membantu teman. Kondisi ini merupakan budaya resiprositas yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan. Semakin besar jumlah orang bisa diajak untuk berbagi, maka akan semakin besar pula ukuran dan kapasitas modal sosial yang dimiliki. Data yang ditemukan dalam kondisi kesediaan untuk membantu tetangga yang dalam kesusahan, sebanyak 195 orang atau 94,70% menyatakan pasti akan membantu. Dan hanya sebanyak 11 orang atau 5,30% yang menyatakan mungkin akan membantu. Dari jawaban responden penelitian ini, tidak ada yang memberikan jawaban tidak untuk memberikan bantuan kepada tetangga yang membutuhkan. Untuk lebih jelasnya kondisi ini dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.7. Kesediaan Memberi Bantuan pada Tetangga yang Membutuhkan

No	Kesediaan Memberi Bantuan	Jumlah (orang)	Persentase
1	Pasti	195	94,70
2	Mungkin	11	5,30
Jumlah		206	100,00

Sumber: Data Kuesioner

Berdasarkan data yang didapat, ternyata unsur solidaritas dalam masyarakat dicerminkan oleh kemudahan mendapatkan pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak dan kesiapan meminjamkan uang apabila ada tetangga yang sangat membutuhkan. Menurut informan penelitian:

“Ada beberapa tetangga yang sering meminjam uang jika ada kebutuhan mendesak. Jumlahnya memang tidak besar. Biasanya, kejadian itu menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru, atau untuk membeli obat jika sakit. Kalau jumlahnya kecil memang masih bisa ditangani orang per orang, tapi kalau jumlahnya sudah lebih besar, misalnya untuk pesta biasanya mereka meminjam ke kas kelompok. Selama ini yang meminjam uang, pemulangan pinjamannya tepat waktu. Mungkin mereka khawatir kalau telat pengembaliannya, takut kalau mau pinjam lagi tidak di kasih.”

Bourdieu (1986) menjelaskan penekanan modal sosial pada jejaring sosial (*social networks*) yang memberikan akses terhadap sumber-sumber daya kelompok. Dengan memiliki akses terhadap sumber daya kelompok (*group resources*) diharapkan seorang individu pada akhirnya akan menikmati manfaat ekonomis. Bagi Bourdieu manfaat ekonomis ini hanya akan dinikmati individu apabila ia secara terus-menerus terlibat dalam kelompok tersebut.

Kelemahan pada jumlah interaksi yang terjadi di masyarakat khususnya kelompok SPP tidak terlepas dari kurangnya keterlibatan dalam kegiatan yang ada dan belum berkembangnya kegiatan karena terbatasnya fasilitas yang tersedia di desa. Walau ada pertemuan rutin yang dilakukan dalam kelompok, pertemuan ini sifatnya “dadakan”, artinya kebanyakan pertemuan-pertemuan kelompok masih dilakukan secara insidental, belum terencana dengan baik.

Hal ini sesuai dengan studi terdahulu yang dilakukan oleh Gibson dan Woolcock (2005) menemukan bahwa rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam rapat-rapat PNPM MP, terutama masyarakat miskin atau Rumah Tangga Miskin (RTM). Dengan kondisi ini maka umumnya tempat pertemuan kelompok juga bisa dilakukan di mana saja dan waktunya bisa kapan saja. Kebanyakan pertemuan kelompok masih dilakukan di tempat biasa mereka dapat berkumpul bersama, misalnya: pengajian-pengajian ibu-ibu, serta pertemuan non formal lainnya. Dengan demikian, Partisipasi RTM seperti yang diharapkan di PTO PNPM MP, belum sepenuhnya terjadi.

Putnam (1995) menyatakan bahwa salah satu yang mendukung ketersediaan jaringan sosial adalah melalui hubungan

pertetangga (*neighbourhood network*). Modal sosial akan berkembang dan menjadi lebih produktif jika digunakan, maka modal sosial perlu dikembangkan agar tetap produktif. Dalam jaringan ini melihat bahwa semakin banyak seseorang mengenal orang lain, maka jaringan yang dimilikinya juga semakin besar yang juga berarti modal sosial yang dimilikinya juga semakin besar. Hubungan ini salah satunya dapat ditunjukkan dengan banyaknya hubungan orang dekat yang bersedia memberikan bantuan.

Dari data yang diperoleh dari responden penelitian, ternyata jumlah teman dekat yang bersedia membantu jika terjadi masalah jumlahnya 1-2 orang saja. Ini menunjukkan bahwa modal sosial yang ada terutama jaringan sosial masih rendah. Umumnya jumlah teman dekat yang dimiliki sebanyak 1 orang saja yang dijawab sebanyak 172 orang (83,50%) responden. Dan hanya 2 orang yang memiliki teman dekat sebanyak 4 orang. Kondisi jumlah teman dekat yang dimiliki responden ini dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.8 Banyaknya Teman Dekat yang Dimiliki

No	Jumlah Teman Dekat	Jumlah	Persentase
1	1 Orang	172	83,50
2	2 Orang	25	12,10
3	3 Orang	7	3,40
4	4 Orang	2	1,00
Jumlah		206	100,00

Sumber: Data Kuesioner

Jaringan sosial tidak saja dikaitkan dengan banyaknya jumlah pertemanan, akan tetapi juga dapat diukur melalui tingkat partisipasi dalam kelompok, misalnya dalam pengajuan protes kepada pihak pemerintah untuk sesuatu yang bermanfaat bagi komunitas. Data yang diperoleh di lapangan menjelaskan bahwa sedikit kegiatan yang ditujukan untuk memprotes kebijakan yang dianggap tidak memihak kepada rakyat. Paling banyak jawaban responden berkaitan dengan pengajuan petisi kepada pemerintah untuk kebaikan komunitas adalah sedikit yaitu 122 orang atau 59,20%. Begitupun ada responden yang menyatakan banyak sekali yaitu sebanyak 72 orang atau 35,00%. Responden yang mengatakan sesekali sebanyak 7

orang atau 3,40%, dan yang mengatakan tidak pernah sebanyak 5 orang atau 2,40%. Kondisi ini dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.9. Pengajuan Petisi kepada Pemerintah untuk Kebaikan Komunitas

No	Pengajuan Petisi kepada Pemerintah	Jumlah	Persentase
1	Tidak Pernah	5	2,40
2	Sekali	7	3,40
3	Sedikit	122	59,20
4	Banyak Kali	72	35,00
Jumlah		206	100.00

Sumber: Data Kuesioner

Masyarakat merupakan mitra dari pemerintah, oleh sebab itu dalam pembangunan yang bersifat partisipatif harus melibatkan masyarakat sejak dari awal pelaksanaan yaitu mulai dari perencanaan sampai dengan akhir kegiatan berupa hasil terhadap kegiatan tersebut. Masyarakat berhak mengetahui kegiatan pemerintah dan pemerintah juga harus memberikan penjelasan secara transparan. Jika kondisi ini terjadi, maka modal sosial sosial akan terbangun dengan baik. Akan tetapi jika salah satu pihak merasa tidak dilibatkan, maka yang akan terjadi adalah sebaliknya yaitu modal sosial akan mengalami kemerosotan. Hal ini dapat pula kita lihat dari jawaban responden mengenai tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Jawaban responden berkaitan dengan kepercayaan kepada pemerintah daerah, pada level terendah yaitu kecil kemungkinan untuk mempercayai pegawai pemerintah daerah yaitu sebanyak 79 orang atau 38,30%. Dan pada level tertinggi yaitu sangat besar kemungkinannya sebanyak 33 orang atau 16,00%. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada institusi pemerintah ini dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.10. Tingkat Kepercayaan Masyarakat kepada Institusi Pemerintah

No	Uraian	Jumlah									
		SKK		KK		TK		BK		SBK	
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
1	Pegawai Pemerintah Daerah	0	0	79	38,30	51	24,80	43	20,90	33	16,00
2	Pegawai Pemerintah Pusat	30	14,60	40	19,40	70	34,00	49	23,80	17	8,30

Sumber: Data Kuesioner

Pada level pemerintah pusat, tingkat kepercayaan pada pemerintah pusat berada pada posisi menengah yaitu tidak kecil dan tidak besar yaitu sebanyak 70 orang atau 34,00%. Kepercayaan pada pemerintah daerah, termasuk dalam kategori kecil karena berada pada daerah “kecil kemungkinannya” yang dijawab oleh 79 orang atau 38,30%. Dari data tersebut, jika dibandingkan maka masyarakat masih lebih percaya dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dibandingkan dengan pemerintah daerah.

Kondisi menyiratkan bahwa bahwa kepercayaan kepada pemerintah masih kecil. Dengan kata lain, masih ada informasi yang dianggap tidak tersampaikan kepada masyarakat, sehingga memunculkan kecurigaan di tengah-tengah masyarakat itu sendiri yang pada akhirnya akan menggerus modal sosial terutama kepercayaan yang ada pada masyarakat tersebut terhadap pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Putnam (2002) menyebutkan bahwa akibat positif yang ditimbulkan dari nilai unsur percaya terhadap aparatur dan kelompok adalah pemerintahan yang memiliki akuntabilitas yang lebih kuat. Dalam kondisi ini masyarakat akan menjadi mitra yang baik bagi pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan pembangunan. Efek percaya terhadap pemerintahan yang tinggi akan meningkatkan kinerja pemerintah di bidang pelayanan publik dan menghindari penyalahgunaan jabatan seperti: korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kepercayaan publik memberikan dampak yang positif bagi pemerintah sehingga mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

Berbagai tindakan kolektif yang didasari atas rasa saling mempercayai yang tinggi akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai ragam bentuk dan dimensi, terutama dalam konteks membangun kemajuan bersama. Modal sosial tersebut memperkaya ide dan kemajuan masyarakat yang mengarah kepada tindakan-tindakan ekonomi.

Modal sosial merupakan modal utama berjalannya roda pembangunan. Hal ini terlihat dari fungsi modal dimana modal sosial memiliki nilai yang positif, yang berarti pengaruh modal sosial akan mendukung pertumbuhan dalam pembangunan masyarakat secara terus menerus. Modal sosial harus tercermin pada tindakan atau perbuatan yang menjunjung tinggi sikap saling menghargai, menghormati segala perbedaan yang ada. Modal sosial akan berakibat pada kerukunan yang akan menciptakan masyarakat dengan kondisi yang dinamis, kreatif dan inovatif serta sikap bergandeng tangan dan bekerjasama dalam menjalankan roda perekonomian.

Kekuatan modal sosial juga terlihat dengan kegiatan untuk saling bekerjasama dalam menjaga ataupun pengawasan terhadap keamanan lingkungan. Ketika terjadi tindakan yang melanggar hukum maka melalui jaringan antar warga, informasi dapat secara cepat diketahui oleh warga lainnya di lingkungannya. Rasa aman dan nyaman dilingkungan masyarakat tercermin pada tabel 5.15. Sebanyak 124 orang atau 60,20% responden mengatakan merasa agak aman berada di lingkungannya. Sebanyak 72 orang atau 35,00% mengatakan merasa agak tidak aman, dan hanya 10 orang atau 4,90% orang mengatakan merasa sangat aman.

Tabel 3.11. Kondisi Keamanan dari kejahatan dan Kekerasan

No	Perasaan	Jumlah	Persentase
1	Sangat Aman	10	4,90
2	Agak Aman	124	60,20
3	Agak Tidak Aman	72	35,00
Jumlah		206	100,00

Sumber: Data Kuesioner

Jaringan sosial yang tercipta, juga memberikan dimensi dalam memberikan bantuan dalam komunitas. Keterlibatan anggota kelompok dalam komunitas memerlukan suatu proses yang mengakar di masyarakat dan membutuhkan pengorbanan waktu serta biaya dan dilakukan secara berkelanjutan.

Berkaitan dengan bantuan yang diberikan anggota kelompok dalam suatu kegiatan yang ada di daerahnya, maka jawaban responden terbagi pada dua, yaitu memberikan bantuan berupa waktu dan bantuan berupa uang. Seluruh responden menjawab bahwa bantuan waktu akan diberikan untuk kegiatan yang ada di daerah mereka.

Sedikit berbeda dengan bantuan berupa waktu, kesediaan memberikan bantuan berupa uang hanya diberikan oleh 68 orang responden atau 33,00%. Bantuan berupa uang ini akan diberikan jika ada kegiatan proyek di daerahnya. Dan sebanyak 133 orang atau 67,00% yang menyatakan ketidakbersediaan mereka membantu dalam bentuk uang. Artinya responden menyediakan waktu luang bagi keikutsertaannya dalam membantu kegiatan yang ada di daerahnya, namun sedikit yang bersedia untuk memberikan bantuan berupa uang dalam kegiatan proyek yang ada di daerahnya. Kondisi bentuk bantuan yang diberikan dalam kegiatan proyek yang ada di daerah dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.12. Bentuk Bantuan yang Diberikan dalam Kegiatan Proyek yang Ada di Daerah

No	Uraian	Jumlah			
		Ya		Tidak	
		<i>f</i>	%	<i>f</i>	%
1	Waktu	206	100,00	0	0
2	Uang	68	33,00	138	67,00

Sumber: Data Kuesioner

Adanya modal sosial dalam jaringan-jaringan akan membentuk hubungan timbal balik salah satunya dalam proses untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan, dimana masyarakat memilih pemimpin mereka sendiri. Menyadari kebutuhan akan pentingnya organisasi atau lembaga yang dapat merepresentasikan

kepentingannya dan kepentingan komunitasnya, sehingga organisasi yang terbentuk nantinya bisa memiliki nilai tawar dan peran dalam pembangunan di daerahnya.

Masyarakat akan bisa sepenuhnya memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang sesuai dengan kriteria atau nilai yang mereka kembangkan sendiri, serta tercipta suatu keselarasan dimana utusan dari masing-masing kelompok bisa bekerja bersama-sama untuk kepentingan masyarakat tingkat desa.

Ketika modal sosial yang berlandaskan pada partisipasi dalam jaringan sosial, sikap saling percaya, kohesifitas sosial, pranata sosial, dan saling tukar kebaikan di masyarakat sudah terbentuk dengan kuat, maka program yang diberikan oleh pemerintah akan bisa diterima dengan baik. Faktor-faktor eksternal yang selama ini melemahkan keberadaan program pemerintah pun bisa diminimalkan.

Program PNPM Mandiri Perdesaan khususnya kegiatan perempuan dalam kelompok SPP, saat ini baru sebatas penyaluran modal usaha bagi kelompok perempuan yang memiliki atau ingin memulai usaha, sebagai strategi pengentasan kemiskinan namun belum mengarahkan kegiatan perempuan kepada pengembangan bisnis yang menguntungkan.

Konteks relasi perempuan dengan pihak lain seringkali kondisi ini masih mencerminkan struktur masyarakat *patriarkhis*. Usaha yang dilakukan perempuan dipahami sebagai kegiatan sampingan dari pekerjaan laki-laki. Situasi tersebut terlihat di dalam pengambilan keputusan pengelolaan usaha, dan pembagian kerja usaha. Meskipun perempuan sebagai pemilik usaha, namun posisinya telah dipersepsikan masyarakat sebagai istri yang bertempat di area domestik. Sehingga walaupun perempuan dan suami bekerja, perempuan masih mengerjakan tugas domestik. Modal sosial selalu diwarnai oleh kecenderungan untuk saling bertukar kebaikan untuk individu-individu yang menjadi bagian dari anggota jaringan. Hubungan timbal balik ini juga dapat diasumsikan sebagai saling melengkapi dan saling mendukung satu sama lain.



This page is intentionally left blank

BAB IV

PENGEMBANGAN MODAL SOSIAL UNTUK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pengembangan modal sosial yang telah ada dalam masyarakat, dimaksudkan agar tetap terjaga nilai-nilai baik yang telah ada selama ini. Tidak hanya sampai disitu, nilai-nilai yang ada ini juga perlu dikembangkan agar dapat berdaya guna lebih baik lagi dalam kehidupan bermasyarakat.

Berkaitan dengan pembahasan permasalahan penelitian tentang pengembangan modal sosial untuk pemberdayaan perempuan, maka hasil penelitian menemukan 3 cara dalam pengembangannya, yaitu: membangun kerja sama dalam kelompok, intensitas komunikasi dan informasi, serta menjaga kohesi sosial dan inklusi kelompok. Berikut ini akan dijelaskan berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan untuk pengembangan modal sosial dalam upaya pemberdayaan perempuan tersebut.

• Membangun Kerja Sama dalam Kelompok

Berbagai model pemberdayaan masyarakat pada intinya lebih menitik beratkan pada kerja sama. Bekerja sama diartikan sebagai bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Charles H. Cooley memberikan gambaran tentang kerja sama dalam kehidupan sosial. Kerja sama timbul jika orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan ini melalui kerja sama; kesadaran akan adanya kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerja sama yang berguna (Soekanto, 1990:80; Setiadi:2011:78).

Berdasarkan apa yang digambarkan oleh Charles H. Cooley di atas, dapat dikatakan bahwa suatu kerja sama yang terjadi dalam kelompok, merupakan suatu hubungan timbal balik individu-individu yang berada dalam suatu kelompok, antara satu dengan lainnya saling membantu dan saling tergantung untuk melakukan suatu kegiatan, yang pada bagian akhirnya dimaksudkan untuk mencapai tujuan bersama. Individu-individu yang ada tersebut merupakan bagian dari kelompok yang memiliki rasa tanggung

jawab bersama, sehingga tujuan yang diinginkan akan bisa dicapai oleh mereka apabila satu dengan yang lainnya saling bekerja sama.

Infrastruktur dinamis dari modal sosial berwujud pada jaringan kerja sama antar manusia. Jaringan tersebut memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi, memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan memperkuat kerja sama dalam kelompok. Masyarakat yang kuat cenderung memiliki jaringan sosial yang kokoh. Orang mengetahui dan bertemu dengan orang lain yang kemudian membangun inter-relasi yang kental, baik yang bersifat formal maupun non formal.

Keinginan untuk bekerja sama dapat terlihat dari kegiatan dalam anggota kelompok SPP yang terlibat aktif dan melakukan kegiatan bagi kelompoknya. Bekerja sama ini juga merupakan unsur yang penting dalam memunculkan modal sosial dalam masyarakat. Tindakan anggota yang proaktif tidak terbatas pada partisipasi dalam artian kehadiran anggota kelompok semata, namun juga adanya kontribusi dari anggota dalam berbagai bentuk.

Tindakan proaktif dari anggota dalam modal sosial dilakukan oleh anggota tidak hanya berorientasi pada peningkatan materi individu semata-mata, akan tetapi juga bertujuan untuk memperkaya hubungan kekerabatan, meningkatkan intensitas kekerabatan, serta mewujudkan tujuan dan harapan bersama.

Keterkaitan yang kuat dan saling mempengaruhi antara anggota yang satu dengan yang lainnya dalam masyarakat merupakan penggerak sekaligus memberi peluang kepada setiap anggota untuk bertindak proaktif. Tindakan proaktif juga merupakan upaya membangun energi di antara anggota masyarakat.

Johnson dan Jhonson (1998) memberikan 5 komponen yang melekat pada ikatan kerja sama dalam kelompok, yaitu:

- Adanya saling ketergantungan yang positif diantara individu-individu tersebut untuk mencapai tujuan;
- Adanya interaksi tatap muka yang dapat meningkatkan sukses satu sama lain di antara anggota kelompok,
- Adanya akuntabilitas dan tanggung jawab personal individu;
- Adanya keterampilan komunikasi interpersonal dan kelompok kecil; dan
- Adanya keterampilan bekerja dalam kelompok.

Kondisi ini juga terjadi dalam kelompok SPP pada penelitian ini. Kegiatan bekerja sama dalam komunitas dilakukan oleh para anggotanya. Sebanyak 131 orang atau 63,60% responden

mengatakan bahwa mereka melakukan kerja sama dengan orang lain di desa untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi komunitasnya. Namun ada juga responden yang menyatakan tidak melakukan kegiatan kerja sama tersebut, yaitu sebanyak 75 orang atau 36,40% responden. Kondisi melakukan kerja sama dengan orang lain yang bermanfaat bagi komunitasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.1. Kerja Sama dengan Orang Lain yang Bermanfaat Bagi Komunitas

No	Uraian	Jumlah			
		Ya		Tidak	
		<i>f</i>	%	<i>f</i>	%
1	Bekerja dengan orang lain di desa melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi komunitas	131	63,60	75	36,40

Sumber: Data Kuesioner

Suatu kerja sama dalam perberdayaan masyarakat kemungkinan besar tidak dapat berjalan atau berlangsung secara optimal dan mencapai tujuan kelompok tanpa adanya kerja sama yang maksimal di antara semua anggota-anggota kelompoknya. Hal ini diartikan bahwa setiap anggota kelompok harus memiliki keinginan untuk bekerja sama yang baik, sehingga akan memungkinkan terbentuknya kolaborasi di antara anggotanya. Jika kondisi dapat tercipta dengan baik maka pada akhirnya akan mendorong para anggota kelompok untuk bekerja sama secara total guna mencapai tujuan secara optimal. Seperti penuturan informan penelitian berikut ini:

"Kita dalam kelompok harus membangun rasa kebersamaan. Jika sudah tidak ada rasa kebersamaan, kelompok akan vakum. Inilah yang kami rasakan sekarang. Kelompok kami tidak banyak kegiatan lagi. Kondisi ini dimulai dari rasa curiga kami kepada ketua kelompok yang mengolah uang kas untuk kepentingan diri sendiri. Selama ini ketua selalu terbuka berkaitan dengan uang kas, tapi belakangan hal itu tidak terjadi lagi. Malah ketua dengan bendahara dan sekretaris juga sudah tidak saling cakapan. Kondisi ini membuat kelompok sempat tidak membayar uang iuran kelompok, dan mendapat teguran dari UPK kecamatan. Padahal selama ini,

kelompok kami bisa dikatakan sebagai kelompok percontohan bagi kelompok SPP yang baru.”

Kegiatan bekerja sama dalam kelompok ini menekankan pada adanya budaya demokratis dalam kelompok. Budaya demokratis akan memberikan rasa tanggungjawab, peduli terhadap sesama, bersikap terbuka, dan memunculkan kreativitas dalam anggota kelompok. Unsur inilah yang merupakan bagian penting sebagai modal sosial dalam pemberdayaan.

Kegiatan pemberdayaan di arahkan untuk menciptakan aktualisasi keberdayaan seseorang atau anggota masyarakat dalam kehidupannya. Ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan modal sosial dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat atau kelompok SPP ini, yaitu: pertama, adanya interaksi antara ekonomi dengan budaya yaitu adanya pengelolaan pihak yang mengatur berbagai peran dari berbagai pihak terutama pemerintah dan masyarakat setempat untuk berperan aktif dalam menjaga hubungan yang harmonis untuk pengembangan modal sosial.

Kedua, membangun jaringan kerja sama untuk memperkuat program-program yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat. Kondisi ini memerlukan modal sosial yang secara langsung maupun tidak langsung akan terhubung dengan jaringan sosial dan akan memberikan penguatan bagi masyarakat.

Soetomo (2011) mengatakan bahwa banyak masyarakat yang bisa berubah menjadi dinamis yang diindikasikan dengan berbagai kegiatan kolektif untuk meningkatkan kondisi kehidupannya sebagai dampak dari fasilitasi yang diberikan oleh pihak eksternal (fasilitator), akan tetapi kemudian secara perlahan mengendur dan kembali dalam posisi semula setelah fasilitasi dihentikan.

Kerjasama dalam kelompok yang telah berjalan selama ini, pada akhirnya telah membangun kemandirian dalam kelompok tersebut. Beberapa kelompok SPP yang ada telah mandiri, baik dari segi keuangan maupun proses penguatan kelompok mereka. Secara keuangan, mereka telah mampu mengelola keuangan mereka sendiri walaupun masih secara sederhana.

Mereka mampu memberikan bantuan berupa pinjaman kepada anggota lainnya yang membutuhkan, tanpa harus masuk dalam kelompok SPP. Mereka telah mampu mengelola keuangan dengan baik, sehingga anggota secara berkala mendapatkan hasil dari usaha tersebut secara berkala. Misalnya menjelang puasa dan lebaran, mereka mendapatkan paket dari kelompok berupa gula dan

tepung yang dapat digunakan untuk membuat kue-kue lebaran. Seperti dikemukakan oleh informan penelitian:

"Kami sudah bisa menikmati hasil dari usaha kami selama ini. Untuk kelompok kami sudah bisa memberikan pinjaman, jika anggota membutuhkan. Kami sudah punya usaha *teratak* (-tenda) pesta, ada usaha pembuatan kue, dan salon. Dari situ, usaha bersama yang kami kelola sudah dapat dipergunakan hasilnya oleh anggota yang lainnya. Tinggal datang kepada pengurus untuk urusan perjanjiannya."

Secara kelompok, kerja sama yang telah dilakukan selama ini juga telah memberikan dampak pada pembangunan jaringan baik internal dalam kelompok itu sendiri, maupun dengan anggota kelompok lainnya. Kerja sama ini telah membantu anggota kelompok SPP dalam membangun kerja sama, baik kaitannya dengan urusan kelompok SPP, atau yang lebih dari itu. Misalnya, mereka telah merancang untuk membentuk "Bank Sampah", yang mana kegiatan ini akan melibatkan banyak orang dari tempat yang berbeda. Jadi selain untuk kepentingan internal kelompok, kerja sama juga sudah mulai dirasakan manfaatnya dalam hubungan yang lebih luas untuk kepentingan masyarakat secara umum.

• Intensitas Komunikasi dan Informasi

Tugas dan peran fasilitator dalam pendampingan masyarakat membutuhkan lebih dari sekedar kecakapan teknik dan penguasaan metodologi, namun juga empati dan keberpihakan kepada masyarakat. Empati semacam itu tidak bisa ditumbuhkan hanya dengan seminggu maupun dua minggu pelatihan fasilitator. Pengalaman di daerah penelitian misalnya, fasilitator tidak tinggal di desa yang didampingi, padahal empati dan keberpihakan yang otentik hanya bisa tumbuh ketika fasilitator *live in*, tinggal bersama masyarakat yang didampingi dan berbaur dengan aktivitas mereka sehari-hari.

Meskipun para fasilitator telah dilatih keterampilan berkomunikasi dan atau kemampuan bersosialisasi akan tetapi tanpa mengenal, memahami dan menggunakan peta komunikasi sosial, serta pengetahuan tentang struktur masyarakat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat, maka kemungkinan besar mereka akan menuai kegagalan diproses selanjutnya.

Kondisi ini juga berdampak kelemahan dari metode fasilitasi untuk mengetahui kebutuhan sebenarnya dari masyarakat. Banyaknya usulan yang menunjuk pada jenis prasarana tertentu yang sebenarnya

diusulkan oleh kelompok dominan saja. Jika kebutuhan akan pembangunan prasarana menjadi bias kepada kaum berdaya, maka pembangunan prasarana tidak akan dapat mengangkat derajat masyarakat dari kemiskinan.

Penentuan keputusan seperti ini merupakan bentuk ketidak inklusifan keputusan, yang tidak hanya menyisakan cerita-cerita kepentingan elit tetapi yang paling mendasar ialah hancurnya modal sosial di akar rumput. Realita tersebut mengakibatkan PNPM Mandiri Perdesaan masih relatif belum menyentuh langsung akar atau inti dari penguatan modal sosial setempat.

Selama ini sumber informasi yang diperoleh oleh masyarakat khususnya kelompok SPP adalah berasal dari tetangga, kemudian siaran televisi, dan terakhir adalah pimpinan komunitas. Padahal informasi berkaitan dengan kegiatan pemerintah akan lebih baik jika diperoleh dari sumbernya langsung, yaitu pemerintah melalui sosialisasi program pemerintah kepada masyarakat. Kondisi 3 sumber informasi penting mengenai apa yang dilakukan pemerintah dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 4.2. Sumber Informasi Penting

No	Sumber Informasi Penting	Jumlah	Persentase
1	Keluarga, teman, tetangga	187	90,77
2	Televisi	157	76,21
3	Pemimpin Komunitas	103	50,00

Sumber: Data Kuesioner

Beberapa kegagalan yang ditemui dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan pengentasan kemiskinan adalah kemiskinan juga berarti kelemahan dalam mengemukakan pendapat, negosiasi, komunikasi, dan bahkan pada tataran ide.

Disinilah seharusnya keberpihakan fasilitator dapat memberikan peluang yang sama, karena jika tidak ada keberpihakan kepada kaum miskin maka kebutuhan mereka tidak dapat diakomodir. Meski realitanya, berbagai kegiatan pemberdayaan yang lahir dari forum konsultasi belum berjalan dengan baik.

Sosialisasi kegiatan program pemerintah dengan menggunakan pendekatan yang tepat, menjadi hal utama yang harus diperhatikan sebelum program berjalan. Hal ini menjadi penting karena ketidaklancaran pelaksanaan program tersebut banyak diakibatkan oleh proses sosialisasi yang seringkali dijalankan secara sepihak oleh para perencana program pemberdayaan. Model yang dilakukan pun bersifat searah (*one way communication*) dan instruktif, sehingga kurang memperhatikan kondisi masyarakat.

Perbedaan persepsi di masyarakat atas pemberian program pengentasan kemiskinan oleh pemerintah juga menjadi masalah. Masyarakat selama ini masih memahami bahwa bantuan yang diberikan pemerintah adalah bersifat hibah. Kondisi ini menambah evaluasi bagi pemerintah untuk bisa mengubah paradigma masyarakat agar tidak selalu bergantung pada bantuan dari pemerintah.

Realitas program pemerintah terutama PNPM Mandiri Perdesaan yang dianggap selama ini masih menyisakan berbagai persoalan seperti: penyelenggaraan PNPM Mandiri Perdesaan yang masih berorientasi pada pendekatan target dan *top-down*, pengabaian nilai-nilai modal sosial setempat dan bias *outsiders*, kurangnya partisipasi, pendekatan yang tidak menyeluruh, harus bisa bertransformasi menjadi program pemberdayaan masyarakat yang lebih mendorong atau memberi inspirasi bagi munculnya usaha untuk melakukan perubahan dan perbaikan.

• Menjaga Kohesi Sosial dan Inklusi Kelompok

Perbedaan yang ada dalam masyarakat di daerah penelitian jarang menimbulkan permasalahan apalagi perilaku kekerasan. Kalaupun ada perbedaan yang berpotensi menimbulkan keresahan atau gangguan ketertiban di lingkungan permukiman, umumnya bersumber dari perbedaan dalam hal kekayaan atau kepemilikan barang materil dan perbedaan identitas maupun status sosial. Perbedaan ini biasanya akan memicu kesenjangan dan prasangka sosial yang rawan bagi stabilitas sosial di lingkungan komunitasnya.

Berdasarkan hasil penelitian, di semua lokasi penelitian kondisi masyarakatnya tidak memiliki prasangka sosial yang negatif terhadap pendatang maupun masyarakat lain yang memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi. Interaksi di antara lapisan masyarakat masih dapat berlangsung dengan lancar tanpa diikuti dengan munculnya prasangka-prasangka yang kurang baik di antara mereka. Interaksi sosial di kalangan warga yang berbeda status sosial

ekonomi dapat berjalan dengan baik, sehingga kondisi lingkungannya tercipta dalam kondisi damai. Walau amat disayangkan karena akhir-akhir ini semakin sering terjadi pencurian.

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat semata, tetapi juga harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, serta terpeliharanya tatanan nilai pada budaya masyarakat setempat. Pemberdayaan sebagai suatu konsep yang implementatif dalam pembangunan berpusat kepada rakyat, tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomi semata, akan tetapi juga terjadi penambahan pada tingkat sosial dan budaya.

Sistem sosial hendaknya menjadi dasar bagi pemberdayaan masyarakat. Oleh karenanya, pemanfaatan modal sosial dalam perencanaan model pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang krusial dan mendesak dalam rangka memberdayakan potensi yang ada untuk kesejahteraan masyarakat.

Faktor yang selama ini menjadi akar permasalahan dari kegagalan berbagai praktek pengentasan kemiskinan adalah karena belum optimalnya pemanfaatan modal sosial setempat yang merupakan nilai-nilai dan hubungan-hubungan sosial yang mengakar dalam struktur masyarakat. Sehingga pada akhirnya individu dalam suatu masyarakat tidak dapat mengkoordinir tindakan untuk mencapai tujuan secara maksimal dalam proses institusionalisasi yang berdampak pada pengembangan kapasitas masyarakat yang berkelanjutan.

Dengan demikian, dalam hal aksi kolektif, resiprositas dan semangat altruisme, kesadaran individual harus ditingkatkan sehingga masyarakat lebih mudah membangun diri, kelompok, lingkungan sosial serta fisik mereka. Hal ini dikarenakan masyarakat memiliki sikap dan orientasi nilai yang relatif terbuka, sehingga resiprositas yang kuat akan memberikan dampak positif yang luas, baik untuk lingkungan sosial sendiri maupun untuk kelompok masyarakat di luar lingkungannya.

Masyarakat di daerah penelitian sebenarnya juga memiliki tingkat resiprositas yang kuat, ternyata dapat menghasilkan dampak positif yang cukup besar bagi kelompok masyarakat lain. Hal ini dikarenakan sikap dan orientasi nilai yang berkembang di beberapa kelompok masyarakat relatif terbuka. Resiprositas yang kuat akan bernilai positif untuk lingkungan sosialnya sendiri, sehingga tidak menghasilkan nilai positif bagi kelompok masyarakat yang lain.

Di daerah penelitian yang merupakan daerah bercorak rural, kelompok yang banyak berperan dalam kehidupan masyarakat adalah kelompok pengajian, dan kelompok warga di lingkungan permukiman. Tingkat partisipasi dalam kelompok cenderung tinggi, demikian pula tingkat kepercayaan dan resiprositas masyarakatnya yang ditandai dengan tingginya aksi kolektif dan kerja sama antar warga masyarakat. Meski daerah rural, namun informasi dan komunikasi sudah dapat diakses secara luas, dan sudah mulai mengandalkan teknologi informasi modern seperti internet.

Kohesi dan inklusivitas sosial relatif tinggi karena masyarakatnya hampir homogen. Tindakan proaktif misalnya dalam partisipasi politik masyarakat yang dapat dilihat dalam kegiatan yang bersifat konvensional seperti dengan memberi suara dalam pemilu dan pilkada relatif tinggi. Hal ini dapat terlihat dari hasil jawaban responden terhadap keikutsertaan mereka pada kegiatan pemilihan umum, baik dalam pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah, yang semua responden (100 %) terlihat dari kegiatan tersebut.

Secara keseluruhan, pemanfaatan modal sosial dalam penanggulangan kemiskinan di daerah ini sudah mulai dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara umum, bersifat *sustainable*, dan kolektif. Meski kelompok yang dominan berada di lingkungan internal permukiman dan beranggotakan masyarakat permukiman itu sendiri, namun akses terhadap sumber daya dari luar yang semestinya terbatas ternyata bisa diatasi dengan adanya keterbukaan antar warga masyarakat. Keterbukaan ini mengakibatkan informasi baru dari luar dengan cepat terserap dan masyarakat di tingkat bawah tak lagi gagap teknologi.

Kecenderungan untuk berhubungan dengan orang-orang dengan kemampuan ekonomi setara memang masih tinggi, namun hal ini tidak menyebabkan masyarakat sulit memperoleh bantuan bila terkena musibah mendadak. Sehingga ketika di antara warganya terkena musibah mendadak dan memerlukan bantuan orang lain, mereka senantiasa siap membantu mengurangi beban tersebut secara bersama-sama. Modal sosial setempat pun dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang lebih produktif.



BAB V

PENUTUP

Diakhir tulisan ini, penulis akan memberikan simpulan atas tulisan yang telah dilakukan. Hasil penelitian terhadap Kelompok SPP di Kecamatan Dolok Merawan maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: bahwa peran modal sosial dalam perberdayaan kelompok SPP adalah penggunaan modal kepercayaan (*trust*) dan norma dalam dinamika kelompok adalah modal sosial ini digunakan sejak awal dibentuknya kelompok sampai dengan pengembangan kelompok selanjutnya. Selain itu modal jaringan sosial (*network*) digunakan dalam memberikan kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. Modal sosial ini memberikan akses terhadap sumber-sumberdaya yang dimiliki oleh kelompok SPP.

Pengembangan modal sosial untuk pemberdayaan perempuan dilakukan dengan cara membangun kerjasama dalam kelompok, mengintensifkan komunikasi dan informasi dalam kelompok SPP, serta membangun kohesi sosial dan inklusi kelompok.

Tulisan ini juga ingin memberikan masukan pada kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Dolok Merawan, diantaranya: PNPM Mandiri Pedesaan hendaknya membuat skala prioritas dalam melakukan pengembangan kebutuhan ke depan, baik kepada perempuan kelompok SPP dan fasilitator PNPM.

Perlu adanya upaya untuk menumbuhkan kesadaran kitis warga masyarakat dan membuka wawasan mereka terhadap dunia luar serta untuk menjamin keberlangsungan program, penting diadakan kerjasama tidak hanya dengan pemerintah tetapi juga dengan swasta dan lembaga non pemerintah.



DAFTAR PUSTAKA

- ____, 2006. Pedoman Pemberdayaan Perempuan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan Jakarta.
- ____, PNPM Membuka Akses 126 Desa Terpencil di Sumut (berita 14 Juni 2010). (<http://www.eksposenews.com>, diakses 12 Oktober 2013).
- ____, Profil PNPM Mandiri Perdesaan Sumatera Utara Tahun 2009, Status per Maret 2009 (<http://www.pnpm.go.id>, diakses 12 Oktober 2013).
- ____. 2003. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis), Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2003.
- Adi, Isbandi R. 2007. Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan. Jakarta: FISIP UI Press.
- Ala, Andre Bayo. 1996. Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan. Yogyakarta: Liberty Offset.
- Alfitri. 2011. Community Development.: Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ancok, D. 2003. Modal Sosial dan Kualitas Masyarakat. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada pada tanggal 3 Mei 2003.
- Arnstein, Sherry R. "A Ladder of Citizen Participation," dalam JAIP, Vol. 35, No. 4, July 1969, pp. 216-224..
- Badan Pusat Statistik. Sumatera Utara Dalam Angka 2014.
- Badaruddin. 2001. Kelembagaan Sosial Ekonomi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan (Studi di Dusun Nelayan Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Medan: Penelitian Dosen Muda, DP3M Dikti-Depdiknas.
- Becker, G. S. 1964. Human Capital: a Theoretical And Empirical Analysis, New York: National Bureau of Economic Research.

- Bourdieu, P. 1977. 'Cultural Reproduction and Social Reproduction', in J. Karabel and A. H. Halsey (eds), *Power and Ideology in Education*, New York, Oxford University Press.
- Bourdieu, P. and Wacquant, L. 1992. *An Invitation to Reflexive Sociology*, University of Chicago Press, Chicago.
- Bungin, Burhan. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Cohen, D. dan Prusak L. 2001. *In Good Company*. Boston: Harvard Business School Press.
- Coleman, J.S. 1961. *Adolescent Society: the social life of the teenager and its impact on education*, Free Press, New York.
- Coleman, J.S. 1988-89. 'Social Capital in the Creation of Human Capital', *American Journal of Sociology*, 94, 95-120.
- Coleman, J.S. 1990. *Equality and Achievement in Education*, Westview Press, Boulder, CO.
- Coleman, J.S. 1991. 'Prologue: Constructed Social Organization', in P. Bourdieu and J. S. Coleman (eds), *Social Theory for a Changing Society*, Westview Press, Boulder, CO.
- Coleman, J.S. 1994. *Foundations of Social Theory*. Belknap Press, Cambridge, MA.
- Coleman, J.S. and Hoffer, T. 1987. *Public and Private Schools: The Impact of Communities*, Basic Books, New York.
- Coleman, J.S, Campbell, E.Q, Hobson, C.J., McPartland, J., Mood, A.M., Weinfeld, F.D. and York, R.L. 1966. *Equality of Educational Opportunity*, United States Government Printing Office, Washington, DC.
- Coleman, J.S, Hoffer, T. and Kilgore, S. 1982. *High School Achievement: Public, Catholic and Private Schools Compared*, Basic Books, New York.
- Creswell, John W. 1994. *Research Design Qualitative and Quantitative Approaches*. Thousands Oaks, London: Sage.
- Dasgupta, Partha and Ismail Serageldin. 1999. *Social Capital: a Multifaceted Perspective*. Washington D.C: The World Bank.
- Field, J. 2003. *Modal Sosial*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Field, J. 2005 *Social Capital and Lifelong Learning*, Policy Press, Bristol.

- Field, J. and Schuller, T. 2000 'Networks, Norms and Trust: Explaining Patterns of Lifelong Learning in Scotland and Northern Ireland', in F. Coffield (ed.), *Differing Visions of the Learning Society: research findings 2*, Policy Press, Bristol.
- Fukuyama, Francis. 2002. *The Great Disruption: Hakikat Manusia dan Rekonstitusi Tatanan Sosial*. Yogyakarta: Qalam.
- Fukuyama, Francis. 2002. *Trust: Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Yogyakarta: Qalam.
- Grotaert, Christiaan. 2004. *Measuring Social Capital: an Integrated Questionnaire*. The World Bank. Wasington D.C.
- Hasbullah, Jousairi. 2006. *Social Capital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia*. Jakarta: MR-United Press.
- Ife, J. 1995. *Community Development: Creating Community Vision, Analysis and Practice*. Longman, Australia
- Ife, J. dan Tesoriero. 2008. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Johnson, D.W. & Johnson, R.T, Smith, Karl A. 1998. *Cooperative Learning Returns to College*.
- Kabeer, Naila , "Conflicts Over Credit: Re-Evaluating the Empowerment Potential of Loans to Women in Rural Bangladesh," *World Development*, 29(1), 2001: 63-84.
- Kerlinger, Fred N. 1992. *Asas-Asas Penelitian Behavior*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Korten, David C. 1993. *Community Management: Asian Experience and Perspectives*. Connecticut: Kumarian Press.
- Lawang, R.M.Z, 2005. *Kapital Sosial: Dalam Perspektif Sosiologik Suatu Pengantar*. Jakarta: FISIP UI Press.
- Lestarini, Purwati. Pengaruh Kredit SPP (Simpan-Pinjam Kelompok Perempuan) PNPM-MP Terhadap Pendapatan Masyarakat di Desa Lanji Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal Tahun 2010. *Dalam Jurnal Pendidikan Ekonomi IKIP Veteran Semarang*, Vol. 01 No. 01, Juni 2013.
- Mahmud, Simeen, "Actually How Empowering in Micro Credit," *Development and Change*, 34(4), 2003: 577-605.

- Mardikanto, Totok dan Purwoko Soebiato. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat: dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Marshall, Catherine and Gretchen B. Rossman, 1989. *Designing Qualitative Research*. Sage Publications
- Mawardi, M.J. 2007. Peranan Social Capital Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Komunitas 2, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*,
- Mayoux, Linda. 2001a. *Gender Equity, Equality and Women's Empowerment: Principle, Development and Framework*. Aga Khan Foundation. (Diakses dari situs <http://www.genfinances.net>.)
- Mayoux, Linda. 2001b. *Women Empowerment Through Sustainable Micro-Finance: Rethinking Best Practice*. (Diakses dari situs <http://www.lindasweb.org.uk>)
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Narayan, Deepa dan Michael F. Cassidy. 2001. A Dimensional approach to Measuring Social Capital: Development and Validation of Social Capital Inventory. *Current Sociology*, March 2001, Vol. 49 (2). 59-102. SAGE Publications.
- Nawawi, Hadari. 2007. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Neuman, W. Lawrence. 2000. *Social Research Method, Qualitative and Quantitative Approach*. AB. Boston, New York.
- Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2009.
- Putnam, R. D. 1995. 'Bowling Alone: America's declining social capital', *Journal of Democracy*, 6, 65-78.
- Putnam, R. D. 1996. 'Who Killed Civic America?', *Prospect*, 7, 24, 66-72.
- Putnam, R. D. 2002. 'Bowling Together', *American Prospect*, 13, 3, (diakses melalui <http://www.prospect.org/print/V13/3/putnamr.html>.)
- Putnam, R. D. 1993a. *Making Democracy Work: civic traditions in modern Italy*, Princeton University Press, Princeton, NJ.

- Putnam, R.D. 1993. *The Prosperous Community: Social Capital and Public Life*. *The American Prospect*, Vo. 14. No. 13.
- Putnam, R.D. 2000. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon and Schuster.
- Remenyi. 2000. "Is There a State of the Art in Microfinance," dalam Remenyi (Ed.) *Microfinance and Poverty Alleviation: Case Studies from Asia and the Pacific*. London: Routledge.
- Ritzer, G. 1996. *Sociological Theory*, McGraw Hill, New York.
- Ritzer, George and Douglas J. Goodman. 2004. *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prenada Media.
- Rose, Kalima. 1992. *Where Women are Leaders: The SEWA Movement in India*. London: Zed
- Salim, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Buku Sumber untuk Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sayogyo. 1999. *Memahami dan Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia*. (Prof Sajogyo 70 Tahun). Kerja sama Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI) Cabang Bogor, dan PT Grasindo.
- Sen, Amartya. 1999. *Development as Freedom*. New York: Anchor Book.
- Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi. Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana.
- Sidayati, Sri. *Pemberdayaan Ekonomi Melalui Dana Bergulir PNPM Mandiri Bagi Kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Desa Sraten Kabupaten Semarang*. Dalam *Jurnal Ilmiah Inkoma*, Volume 24, Nomor 1, Februari 2013.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi baru keempat tahun 1990. Jakarta: Rajawali Pres.
- Soetomo. 2012a. *Keswadayaan Masyarakat: Manifestasi Kapasitas Masyarakat untuk Berkembang Secara Mandiri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soetomo. 2012b. *Pembangunan Masyarakat: Merangkai Sebuah Kerangka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soetomo. 2013a. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Soetomo. 2013b. *Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Spradley, James. 1979. *The Ethnographic Interview*, New York : Rinehart & Winston.
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama
- Sulstiani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta, Gava Media.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suparjan dan Suyatno Hempri. 2003. *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Syahra, Rusdi dkk. 2000. *Anomi Dan Modal Sosial : Memahami Krisis Multi Dimensional*. Jakarta: Puslitbang Kemasyarakatan Dan Budaya-LIPI.
- Usman, Sunyoto, 2006. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Woller, Garry M, & Warner Woodworth, "Micro Credit and Third World Development Policy," *Policy Studies Journal*, 29 (2), 2001: 265-271.
- Wrihatnolo, Randy R, dan Riant Nugroho Dwidjowito. 2007. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Yunus, Muhammad. 2007. *Bank Kaum Miskin*. Depok: Marjin Kiri.



RIWAYAT PENULIS

Masih tingginya angka kemiskinan yang ada di masyarakat, menyebabkan pemerintah mencari suatu jalan untuk program pengentasan kemiskinan yang sudah lama terjadi di negeri ini. Sudah banyak program yang diluncurkan namun belum mencapai hasil yang optimal. Terakhir pemerintah meluncurkan Program PNPM Mandiri Perdesaan yang di dalamnya terdapat satu program khusus untuk perempuan yang disebut dengan Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Program ini sebagai suatu program penanggulangan kemiskinan dalam pelaksanaannya berbasis pada pemberdayaan masyarakat, khususnya kelompok perempuan. Tulisan ini ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana peran modal sosial dalam pelaksanaan Program PNPM Mandiri khususnya SPP dan upaya yang dilakukan dalam pemberdayaan perempuan melalui pengembangan unsur-unsur modal sosial.

Tulisan ini bersumber dari hasil penelitian yang dilakukan di 10 desa di Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa peran modal sosial dalam pemberdayaan kelompok SPP adalah penggunaan modal kepercayaan (trust) dan norma dalam dinamika kelompok. Modal sosial ini digunakan sejak awal dibentuknya kelompok sampai dengan pengembangan kelompok selanjutnya. Selain itu modal jaringan sosial (network) digunakan dalam memberikan kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. Modal sosial ini memberikan akses terhadap sumber-sumberdaya yang dimiliki oleh kelompok SPP. Pengembangan modal sosial untuk pemberdayaan perempuan dilakukan dengan cara membangun kerja sama dalam kelompok, mengintensifkan komunikasi dan informasi dalam kelompok SPP, serta membangun kohesi sosial dan inklusi kelompok.

UNIMAL PRESS

ISBN 978-602-464-038-5



9

786024

640385